

**PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, TINGKAT  
PENGANGGURAN TERBUKA, PENDIDIKAN, DAN PDRB TERHADAP  
ANGKA KRIMINALITAS DI PROVINSI LAMPUNG (2019-2022)**

Oleh

**GILAR CAHYA ANDROMEDA**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU EKONOMI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung  
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1  
Gedong Meneng, Bandar Lampung 35145

**PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, TINGKAT  
PENGANGGURAN TERBUKA, PENDIDIKAN, DAN PDRB TERHADAP  
ANGKA KRIMINALITAS DI PROVINSI LAMPUNG (2019-2022)**

Tesis

Oleh :

Nama : Gilar Cahya Andromeda  
NPM : 2221021018  
Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M.



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, PENDIDIKAN, DAN PDRB TERHADAP ANGKA KRIMINALITAS DI PROVINSI LAMPUNG (2019-2022)**

**Oleh**

**Gilar Cahya Andromeda**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), pendidikan, dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap angka kriminalitas di Provinsi Lampung pada periode 2019–2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa: ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan indeks Gini Ratio, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan yang diproksi melalui angka partisipasi kasar (APK), PDRB per kapita, serta angka kriminalitas berbentuk time series pada tahun 2019–2022, dengan analisis berdasarkan cross-section kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda serta tipologi untuk memahami pola dan struktur ekonomi di berbagai daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan, dan PDRB secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas. Kenaikan angka kriminalitas di Provinsi Lampung cenderung disebabkan oleh ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan, dan PDRB. Melalui analisis tipologi, daerah dengan ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) dan angka kriminalitas tinggi meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Plotting antara TPT dan angka kriminalitas menunjukkan bahwa daerah dengan TPT serta kriminalitas tinggi adalah Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Kota Bandar Lampung. Plotting antara PDRB dan angka kriminalitas mengindikasikan bahwa daerah dengan PDRB dan kriminalitas tinggi meliputi Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kota Bandar Lampung. Sementara itu, plotting antara tingkat pendidikan dan angka kriminalitas menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan serta angka kriminalitas tinggi adalah Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung perlu memberikan perhatian khusus terhadap pertumbuhan ekonomi (ketimpangan pendapatan dan PDRB) dengan cara menyelesaikan permasalahan sosial seperti pengangguran, akses pendidikan, dan kriminalitas.

**Kata Kunci:** Angka kriminalitas, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka,, PDRB dan tingkat pendidikan

## **ABSTRACT**

### ***The Influence of Income Inequality, Open Unemployment Rate, Education, and PDRB on Crime Rates in Lampung Province (2019–2022)***

By

**Gilar Cahya Andromeda**

*This study aims to analyze the influence of income inequality, open unemployment rate (TPT), education, and Gross Regional Domestic Product (PDRB) on crime rates in Lampung Province from 2019 to 2022.*

*The research employs a quantitative approach with a correlational design. The data utilized in this study are secondary data, comprising income inequality measured by the Gini Ratio index, the open unemployment rate, education proxied through the Gross Enrollment Rate, PDRB per capita, and crime rates in the form of time-series data from 2019 to 2022, analyzed using cross-sectional data from districts and cities in Lampung Province. The data analysis methods used include multiple linear regression and typology analysis to understand patterns and economic structures across different regions.*

*The findings reveal that GR, TPT, APK, and PDRB together have a significant influence on crime rates. The increasing trend in crime rates in Lampung Province is predominantly driven by income inequality, TPT, education levels, and PDRB. Through the typology analysis, regions with high economic inequality (Gini Ratio) and high crime rates include Bandar Lampung City, East Lampung, and Central Lampung. The analysis of TPT and crime rates shows that regions with high TPT and crime rates are South Lampung, North Lampung, and Bandar Lampung City. The analysis of PDRB and crime rates indicates that regions with high PDRB and crime rates include South Lampung, East Lampung, Central Lampung, and Bandar Lampung City. Furthermore, the analysis of education levels and crime rates reveals that regions with high education levels and high crime rates include East Lampung, Central Lampung, and Bandar Lampung City. Based on these findings, the Lampung Provincial Government needs to prioritize addressing economic growth issues (income inequality and PDRB) by resolving social problems such as unemployment, access to education, and crime.*

**Keywords:** *Crime Rate, Income Inequality, Open Unemployment Rate, PDRB, and Education Level*

Judul Tesis : Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, dan PDRB Terhadap Angka Kriminalitas di Provinsi Lampung (2019-2022)

Nama Mahasiswa : *Gilar Cahya Andromeda*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2221021018

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Program : Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
	
Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M NIP. 19670710 199003 2 001	Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M NIP. 19800705 200604 2 002

2. Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi



Dr. Asih Murwiati, S.E, M.E.  
NIP 19740410 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.

Sekretaris : Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M.

Penguji I : Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.

Penguji II : Prof. Toto Gunarto, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nanobi, S.E., M.Si.  
NIP 19660621199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Maret 2025

## PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Tesis ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan jiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya siap dan sanggup untuk menerima hukuman/sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Mei 2025  
Penulis



Gilar Cahya Andromeda

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Gilar Cahya Andromeda, SE., CFRA  
Tempat, Tanggal Lahir : Adijaya, 17 September 1994  
Alamat : Jl. Danau Laut Tawar, Bandarlampung  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Menikah  
Pekerjaan : ASN Kejaksaan Republik Indonesia

### **Pendidikan**

- Sekolah Dasar Negeri 1 Poncowati
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Terbanggi Besar
- Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Terbanggi Besar
- Bina Nusantara University S1 School of Business and Management
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Auditor Ahli Pertama
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Auditor Forensik

### **Pengalaman**

- Ketua Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dinding Penahan Tanah Sungai Way Ngison Kabupaten Pesisir Barat.
- Ketua Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Bangunan Gedung RSUD Mayjen H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara.
- Saksi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Bantuan Kelompok Tani Lebah Madu Kabupaten Tanggamus.
- Saksi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Kabupaten Mesuji.
- Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Usaha Rakyat Bank BRI Pringsewu.
- Tim Audit Investigasi Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah LPTQ Kabupaten Pringsewu.

## **PERSEMBAHAN**

Fiona Salfadila Hasan, S.H., M.H.  
Nazalea Harana Meda

## SANWACANA

Alhamdulillah atas puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan Nabi besar Muhammad SAW atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, dan PDRB Terhadap Angka Kriminalitas di Provinsi Lampung (2019-2022). Pada penulisan tesis ini penulis sangat menyadari bahwa hasil ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Dr. Asih Murwiati, S.E, M.E. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi sekaligus sebagai Dosen Penguji
3. Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M., selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak dukungan kepada penulis
4. Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M., selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran untuk perbaikan tesis ini
5. Prof. Toto Gunarto, S.E., M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran konstruktif untuk tesis ini
6. Orang Tua dan Keluarga Besar semua yang memberikan motivasi dan dukungan yang tak terhingga
7. Rekan-rekan satu angkatan Magister Ilmu Ekonomi 2022 dan rekan-rekan kerja di Kejaksaan Tinggi Lampung
8. Berbagai pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna masih terdapat banyak kekurangan. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi dunia akademis

Bandar Lampung    Mei 2025  
Penulis,

Gilar Cahya Andromeda

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii

### I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	17
1.4 Manfaat Penelitian .....	16

### II. LANDASAN TEORI

2.1 Peran Pemerintah .....	18
2.2 Ketimpangan .....	20
2.3 Tingkat Pengangguran .....	21
2.3.1 Pengertian Pengangguran .....	21
2.3.2 Jenis-Jenis Pengangguran .....	23
2.4 Pendidikan .....	26
2.4.1 Pengertian .....	26
2.4.2 Teori-Teori Pendidikan .....	27
2.4.3 Pengukuran Tingkat Pendidikan .....	28
2.5 PDRB .....	28
2.5.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	28
2.5.2 Kegunaan PDRB .....	29
2.5.3 Pendekatan Perhitungan PDRB .....	30
2.6 Kriminalitas .....	31
2.6.1 Pengertian Kriminalitas .....	31
2.6.2 Jenis- jenis Kriminalitas .....	33
2.6.3 Faktor-faktor Penyebab Kriminalitas .....	33
2.6.4 Bentuk-Bentuk Tindakan Kejahatan .....	35
2.7 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Angka Kriminalitas ....	35
2.8 Pengaruh TPT Terhadap Angka kriminalitas .....	37
2.9 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angka kriminalitas .....	38
2.10 Pengaruh PDRB Terhadap Angka kriminalitas .....	40
2.11 Tipologi .....	41
2.12 Tinjauan Empiris.....	44
2.13 Kerangka Pemikiran .....	46
2.14 Hipotesis .....	50

### III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian .....	53
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	53
3.3 Data Penelitian .....	54
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	54
3.5 Alat Analisis .....	57

3.5.1 Uji Asumsi .....	57
3.5.2 Regresi Data Panel .....	58
3.5.3 Pengujian Hipotesis .....	61
3.5.4 Analisis Tipologi .....	62

#### **IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskriptif Statistik .....	65
4.1.1 Deskripsi Data .....	65
4.1.2 Deskripsi data Ketimpangan Pendapatan .....	66
4.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	67
4.1.4 Pendidikan .....	69
4.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	70
4.1.6 Angka Kriminalitas .....	72
4.2 Hasil Penelitian .....	74
4.2.1 Penentuan Model Regresi Data Panael .....	74
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	76
4.2.3 Hasil Persamaan Regresi Data Panel .....	79
4.2.3 Pengujian Hipotesis .....	85
4.2.4 Tipologi .....	88
4.3 Pembahasan .....	102

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	132
5.2 Saran .....	133

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam Angka) .....	2
Tabel 2.	Rasio Gini Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam Indeks) .....	5
Tabel 3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam persen) .....	8
Tabel 4.	Tingkat Pendidikan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam persentase) .....	12
Tabel 5.	PDRB Perkapita di Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam angka) .....	14
Tabel 7	Klasifikasi Kejahatan .....	35
Tabel 8.	Penelitian Terdahulu .....	44
Tabel 9	Tipologi Kriminalitas, Gini Ratio, TPT, Pendidikan, dan PDRB ....	63
Tabel 10	Deskripsi Data .....	65
Tabel 11	Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam indeks) .....	66
Tabel 12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam persentase) .....	68
Tabel 13	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 .....	69
Tabel 14	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 .....	71
Tabel 15	Angka Kriminalitas di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 .....	73
Tabel 16.	Hasil uji Chow .....	74
Tabel 17.	Hasil uji <i>Hausman</i> .....	75
Tabel 18.	Hasil uji <i>Lagrange Multiplier</i> .....	75

Tabel 19	Hasil Uji Normalitas .....	76
Tabel 20	Hasil Durbin Watson .....	78
Tabel 21	Hasil Uji Multikolonieritas .....	79
Tabel 22	Hasil Persamaan Regresi Data Panel .....	79
Tabel 23.	<i>Individual Effect</i> Regresi Data Panel .....	81
Tabel 24	Hasil Uji t .....	85
Tabel 25	Hasil Uji F .....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Grafik Angka Kriminalitas di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah .....	3
Gambar 2.	Grafik Rasio gini Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah .....	6
Gambar 3.	Grafik TPT Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Selatan .....	9
Gambar 4.	Angka kriminalitas, Gini Ratio dan TPT di Lampung Utara, Lampung Tengah dan Bandar Lampung .....	11
Gambar 5.	Klasifikasi Menurut Analisis Tipologi .....	43
Gambar. 6	Kerangka Teori .....	47
Gambar. 7	Kerangka Pemikiran .....	50
Gambar 8	<i>Scatter Plot</i> uji Heteroskedastisitas .....	77
Gambar 9	Tipologi Berdasarkan Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kriminalitas.....	88
Gambar 10	Tipologi Berdasarkan TPT dan Angka Kriminalitas .....	92
Gambar 11	Tipologi Berdasarkan Pendidikan dan Angka Kriminalitas .....	96
Gambar 12	Tipologi Berdasarkan PDRB dan Angka Kriminalitas .....	99

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kejahatan atau kriminal merupakan masalah serius yang selalu dihadapi dan sulit dihindari di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang (Hardijanto & Qomar, 2018). Tingkat kriminalitas sering menjadi perhatian utama dalam menjaga keamanan suatu negara. Berdasarkan laporan *World Population Review* (WPR), Venezuela mencatat indeks kejahatan tertinggi sebesar 84,36, disusul Papua Nugini dengan indeks 80,04, dan Afrika Selatan dengan indeks 77,29. WPR juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat kejahatan biasanya ditemukan di wilayah dengan kemiskinan tinggi dan peluang kerja yang terbatas (Mutia, 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kriminalitas di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2022, mencakup jumlah dan kualitas kejahatan. Tingginya angka kriminalitas menciptakan ketidakstabilan keamanan, yang menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal. Kondisi ini berujung pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan, yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data terkini, Lampung menempati posisi ke-6 sebagai provinsi dengan angka kriminalitas tertinggi di Indonesia pada tahun 2021, dengan jumlah 9.674 kasus. Provinsi ini berada di bawah provinsi seperti Sumatra Utara (36.534 kasus), DKI Jakarta (29.103 kasus), dan Jawa Timur (19.257 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa Lampung termasuk dalam wilayah dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya (GoodStats, 2022).

Penelitian ini perlu dilakukan karena beberapa alasan kunci adanya *crime rate* di Lampung yang mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2022, angka kejahatan per 100.000 penduduk mencapai 122, naik dari 113 pada tahun 2020. Peningkatan ini menandakan adanya risiko yang lebih tinggi terhadap kriminalitas di wilayah ini bahkan Provinsi Lampung menduduki posisi ke-6 dalam angka

kejahatan tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Meskipun provinsi lain seperti Sumatra Utara dan DKI Jakarta memiliki angka yang lebih tinggi, Lampung tetap menonjol sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kriminalitas yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada konsentrasi kejahatan di beberapa wilayah yang menjadi perhatian dalam konteks keamanan dan ketimpangan sosial.

Dengan angka kriminalitas yang tinggi serta tren peningkatan, Lampung menjadi lokus yang relevan dalam penelitian sehingga dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab tingginya angka kriminalitas di provinsi Lampung dan bagaimana intervensi di bidang ekonomi dapat membantu menurunkan tingkat kejahatan tersebut.

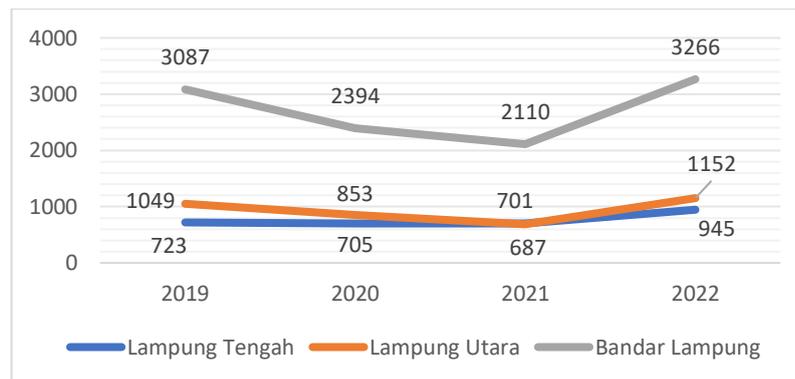
Hasil kajian fiskal regional yang dikeluarkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung menjelaskan salah satu tantangan sosial kependudukan Provinsi Lampung adalah tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas (BPS, 2023). Bahkan ada stigma yang menganggap provinsi Lampung sebagai daerah rawan tindak kejahatan, pembegalan dan kejahatan lainnya. Data kriminalitas di Provinsi Lampung ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam Angka)

Wilayah Satuan Kerja	Jumlah Angka Kriminalitas			
	2019	2020	2021	2022
Lampung Barat	176	176	197	226
Tanggamus	563	410	366	712
Lampung Selatan	650	463	625	874
Lampung Timur	456	587	669	928
Lampung Tengah	723	705	701	945
Lampung Utara	1049	853	687	1152
Way Kanan	478	316	294	425
Tulang Bawang	690	348	322	591
Pesawaran	268	223	223	342
Pringsewu	40	389	244	276
Mesuji	201	165	206	339
Tulang Bawang Barat	20	290	225	374
Pesisir Barat	-	-	-	-
Bandar Lampung Metro	3087	2394	2110	3266
	528	511	509	744
<b>Total</b>	<b>8.929</b>	<b>7.830</b>	<b>7.378</b>	<b>11.194</b>

Sumber: Data BPS Provinsi Lampung, 2019-2022

Jumlah angka kriminalitas di Provinsi Lampung tahun 2019 sebanyak 8.929 kasus, disusul pada tahun 2020 sebanyak 7.830 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 7.378 kasus dan tahun 2022 meningkat menjadi 11.194 kasus. Kota Bandar Lampung masih menempati kota dengan kasus tertinggi yaitu 3266 kasus diikuti kabupaten Lampung Utara dengan 1152 kasus dan Lampung Tengah dengan 945 kasus. Deskripsi grafis ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Grafik Angka Kriminalitas di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah

Meningkatnya kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi. Peningkatan ekonomi yang diterapkan oleh Indonesia mencakup semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk baik warga pedesaan maupun perkotaan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk Indonesia. Upaya pembangunan ekonomi ini difokuskan pada pertumbuhan sektor ekonomi yang belum merata dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, namun kebijakan ekonomi belum mampu menurunkan ketimpangan ekonomi (Dulkiah, 2020).

Ketimpangan pendapatan bisa menjadi faktor penting dalam menjelaskan perbedaan angka kriminalitas, misalnya angka kriminalitas di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Tengah. Bandar Lampung mungkin memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi daripada Lampung Utara dan Lampung Tengah. Ketika ada kesenjangan besar antara pendapatan tinggi dan rendah, terkadang masyarakat yang kurang mampu lebih rentan terhadap kriminalitas karena mereka mungkin merasa terpinggirkan dan putus asa secara ekonomi. Daerah perkotaan yang cenderung memiliki tingkat biaya hidup lebih tinggi, kesenjangan antara pendapatan mungkin lebih menonjol. Ini bisa

memicu frustrasi sosial dan ekonomi di antara penduduk yang kurang mampu, yang dapat meningkatkan kemungkinan terlibat dalam kegiatan kriminal (BPS, 2024).

Menyelidiki iklim investasi di masing-masing daerah dapat memberikan pemahaman tambahan tentang perbedaan dalam angka kriminalitas. Iklim investasi menjadi terganggu, kesempatan kerja semakin sedikit serta angka pengangguran meningkat. Sebagai pusat administrasi dan bisnis di Lampung. Bandar Lampung mungkin menarik lebih banyak investasi daripada daerah lain. Keberadaan industri, perusahaan, dan infrastruktur yang berkembang di kota ini dapat menciptakan lebih banyak peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan ketimpangan pendapatan karena kesenjangan pekerja terampil dengan pekerja lainnya.

Daerah dengan iklim investasi yang kuat cenderung menawarkan lebih banyak kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi bagi penduduknya. Ini dapat mengurangi tingkat frustrasi ekonomi dan mengurangi dorongan untuk terlibat dalam kriminal. Sebaliknya, daerah dengan iklim investasi yang lemah mungkin mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan ketidakpastian ekonomi, yang dapat meningkatkan tekanan sosial dan frustrasi ekonomi penduduk dan pada gilirannya meningkatkan kecenderungan terlibat dalam kriminalitas.

Selama beberapa tahun terakhir, dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, terdapat perkembangan ekonomi yang stabil dan menunjukkan peningkatan. Misalnya, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung mencapai 4,5%, sementara pada tahun 2020 dan 2021, angka tersebut meningkat menjadi 6,0% dan 6,3%. Namun, dari segi sosial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak merata bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi antar wilayah (Todaro & Smith, 2011).

Ketimpangan pendapatan antar wilayah menyebabkan kriminalitas tinggi, padahal, pemerataan pendapatan di masyarakat sangat penting karena ketimpangan pendapatan berpotensi menimbulkan kriminalitas. Demikian halnya dengan peningkatan pengangguran, angka kriminalitas di Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan pada tahun 2020. Pada awal pandemi, angka kriminalitas di Lampung naik sebesar 2-5% dan angka kriminalitas tahun 2020 mencapai 2.336 kasus, meningkat 602 kasus (31%) dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbedaan signifikan tingkat kemajuan antar wilayah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan setiap wilayah. Selain berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, proses pembangunan juga memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan, dan pengangguran (Todaro, 2011).

Ketidaksetaraan ini dapat memiliki dampak negatif berupa ketidakefisienan ekonomi, pelemahan stabilitas sosial, kecemburuan sosial, dan potensi peningkatan angka kriminalitas (Todaro, 2011). Ketimpangan pendapatan diukur melalui gini ratio. Rasio ini digunakan sebagai instrumen pengukuran untuk menilai tingkat ketidaksetaraan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam populasi tertentu. Pengukuran distribusi pendapatan yang dihasilkan oleh Gini Ratio menghasilkan koefisien yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 mengindikasikan tidak ada ketimpangan, sedangkan nilai 1 menggambarkan ketimpangan yang tinggi. Artinya, jika sebuah wilayah memiliki rasio gini 0, berarti distribusi pendapatan penduduk di wilayah tersebut merata, sebaliknya, jika rasio gini 1, maka distribusi pendapatan penduduk tidak merata (Dulkiah, 2020).

Data yang berasal dari BPS untuk tahun 2019-2022 rasio gini di Indonesia relatif tinggi, dengan angka 0,380 di tahun 2019, 0,385 di tahun 2020 dan 0,381 di tahun 2021 (BPS, 2024). Rasio gini di Provinsi Lampung pada 2019 adalah 0,330, tahun 2020 sebesar 0,320, tahun 2021 sebesar 0,321 dan tahun 2022 sebesar 0,314 (BPS Provinsi Lampung, 2023). Uraian dari angka rasio gini di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Gini Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam Indeks)

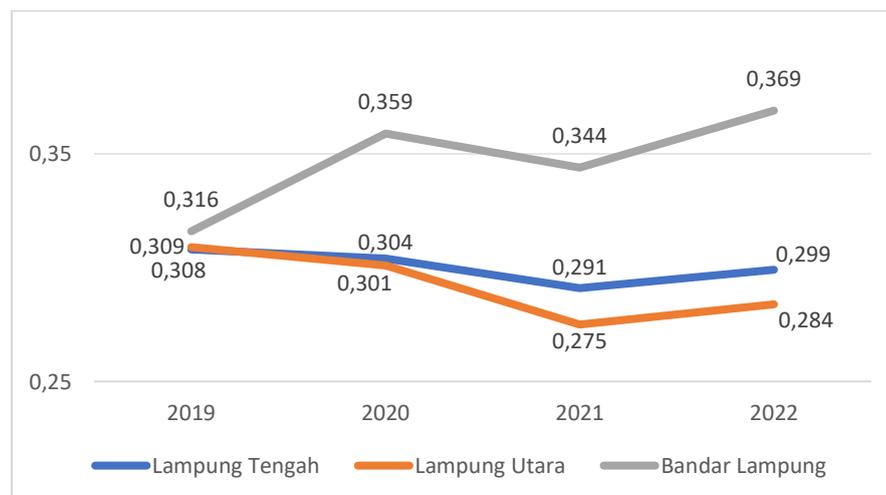
Wilayah	Gini Ratio Kabupaten/Kota			
	2019	2020	2021	2022
Lampung Barat	0,296	0,295	0,281	0,284
Tanggamus	0,314	0,293	0,265	0,261
Lampung Selatan	0,331	0,299	0,268	0,260
Lampung Timur	0,302	0,315	0,284	0,283
Lampung Tengah	0,308	0,304	0,291	0,299
Lampung Utara	0,309	0,301	0,275	0,284
Way Kanan	0,299	0,311	0,283	0,283
Tulang Bawang	0,322	0,279	0,292	0,287
Pesawaran	0,310	0,288	0,299	0,251

Lanjutan Tabel 2

Pringsewu	0,295	0,310	0,277	0,272
Mesuji	0,286	0,308	0,272	0,280
Tulang Bawang Barat	0,316	0,272	0,282	0,261
Pesisir Barat	0,330	0,281	0,322	0,290
Bandar Lampung	0,316	0,359	0,344	0,369
Metro	0,342	0,299	0,309	0,299
Provinsi Lampung	0,330	0,320	0,321	0,341

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Tabel 2 menyajikan data mengenai tingkat ketimpangan pendapatan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung menunjukkan adanya variasi rasio gini antarwilayah. Variasi ini mencerminkan perbedaan distribusi pendapatan yang signifikan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan ekonomi di masing-masing daerah. Misalnya, pada tahun 2019, angka rasio gini tertinggi adalah 0,342 untuk Kota Metro sedangkan rasio gini terendah adalah 0,286 di Kabupaten Mesuji. Sepanjang tahun 2020-2022 angka rasio gini tertinggi ada di Kota Bandar Lampung yaitu 0,359 sedangkan gini terendah tahun 2020 adalah 0,272 di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tahun 2021 adalah 0,265 di Kabupaten Tanggamus. Tahun 2022 adalah 0,265 di Kabupaten Tanggamus. Jika rasio gini tersebut dikomparasikan dengan kasus kriminalitas di Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung terlihat sesuai, misalnya Kota Bandar Lampung dengan rasio gini di atas 0,3 sepanjang tahun 2019-2022 adalah kota dengan kasus kriminalitas yang relatif tinggi di kurun waktu yang sama. Rasio gini dari Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah adalah:



Gambar 2. Grafik Rasio gini Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah

Pemerataan pendapatan di masyarakat sangat penting karena ketimpangan pendapatan berpotensi menimbulkan kecemburuan dan peningkatan angka kriminalitas dan konflik sosial. Gini ratio yang tinggi, dapat menciptakan ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong untuk terlibat dalam kegiatan kriminalitas. Di sisi lain masyarakat yang merasa tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, atau kesempatan ekonomi lainnya mungkin lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan yang mendukung kriminalitas. Tingkat ketimpangan juga dapat mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang buruk di suatu daerah, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, atau ketidakstabilan sosial. Kondisi-kondisi ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kriminalitas (Anata, 2013).

Melalui data rasio gini untuk Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Lampung Tengah, dapat dianalisis implikasi ketimpangan pendapatan terhadap angka kriminalitas di masing-masing wilayah. Rasio gini yang relatif tinggi di Bandar Lampung menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang besar antara kelompok masyarakat, dengan sebagian kecil penduduk mendapatkan sebagian besar pendapatan. Kondisi ini memungkinkan adanya kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan secara ekonomi. Ini dapat menyebabkan peningkatan frustrasi dan kemungkinan adanya aktivitas kriminalitas sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi yang tidak adil. Rasio gini di Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah yang lebih rendah dibandingkan Bandar Lampung masih memungkinkan adanya ketimpangan yang menimbulkan frustrasi sosial yang perlu mendapatkan perhatian

Beberapa studi yang mendukung penjelasan ini diantaranya adalah Hariani & Syahputri, (2016) yang menginvestigasi hubungan antara ketimpangan pendapatan dan angka kriminalitas di Indonesia menggunakan pendekatan data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara ketimpangan pendapatan dan angka kriminalitas di Indonesia. Penelitian Hariani, (2019) menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan dapat berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas.

Penelitian Rahmalia et al., (2016) yang menyimpulkan ketimpangan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Penelitian Gunarto & Marselina, (2016) menunjukkan kesimpulan yang serupa bahwa rasio gini memiliki pengaruh positif positif dan signifikan terhadap tindak kriminalitas. Tetapi penelitian Sugiharti et al., (2022) menyimpulkan ketimpangan pendapatan tidak memiliki hubungan signifikan dengan tingginya aktivitas kriminal, demikian juga dengan penelitian Wahyu et al., (2021)

Banyak faktor dan latar belakang pelaku kriminal yang perlu diungkap sehingga diketahui karakteristiknya terhadap peluang melakukan tindak kriminalitas. Demikian juga penelitian Brenes-Camacho dan Cuestas, (2018) menemukan bahwa ketidaksetaraan pendapatan tidak berhubungan positif dengan angka kriminalitas di wilayah tersebut. Beberapa penelitian tersebut mendukung penjelasan bahwa ketimpangan pendapatan dapat berkontribusi pada angka kriminalitas, dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi cenderung berkorelasi dengan angka kriminalitas yang lebih tinggi.

Selain gini ratio yang dapat memberikan dampak terhadap angka kriminalitas, tingkat pengangguran tinggi dapat memperburuk angka kriminalitas melalui ketimpangan pendapatan dan pengangguran cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang bekerja. Namun, hubungan ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor lainnya. Pengangguran menyebabkan pendapatan berkurang atau hilang sama sekali sehingga memberikan ekspektasi utilitas kriminalitas yang lebih besar kepada calon pelaku kriminalitas menurut Astari et al., (2019), BPS mencatat data TPT di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam persen)

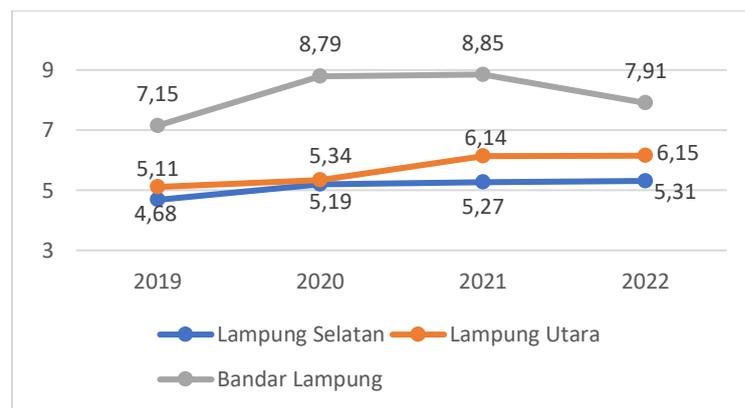
Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
	2019	2020	2021	2022
Lampung Barat	1,66	2,13	2,83	2,10
Tanggamus	2,96	2,96	2,93	3,70
Lampung Selatan	4,68	5,19	5,27	5,31
Lampung Timur	2,87	2,64	3,05	3,30
Lampung Tengah	2,61	4,22	4,31	3,56
Lampung Utara	5,11	5,34	6,14	6,15
Way Kanan	3,59	3,56	3,36	3,36

Lanjutan Tabel 3

Tulang Bawang	4,01	4,84	4,10	3,52
Pesawaran	4,41	4,64	4,19	5,06
Pringsewu	4,92	5,77	4,85	4,77
Mesuji	3,61	3,71	3,42	3,22
Tulang Bawang Barat	3,57	3,46	3,35	4,12
Pesisir Barat	3,25	3,41	3,08	3,73
Bandar Lampung	7,15	8,79	8,85	7,91
Metro	5,12	5,40	5,00	4,34
Provinsi Lampung	4,03	4,67	4,69	4,52

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa TPT di Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 4,03 persen, pada tahun 2020 sebesar 4,67 persen, tahun 2021 sebesar 4,69 persen dan tahun 2022 sebesar 4,52. Kondisi TPT di kota Bandar Lampung menunjukkan persentase tertinggi yaitu 7,91 persen, diikuti dengan Kabupaten Lampung utara yaitu 6,15 persen dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 5,31 persen. Gambaran TPT digambarkan pada grafik berikut:



Gambar 3. Grafik TPT Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Selatan

Masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial, orang menganggur dan tidak berpenghasilan berarti tidak memiliki ekspektasi keuntungan dari pekerjaan legal, karena itulah kecenderungan melakukan kejahatan (Hariani, 2019).

Kota Bandar Lampung sebagai pusat provinsi dan kota terbesar di Lampung, cenderung menjadi tujuan utama migrasi dari daerah lain di provinsi tersebut. Urbanisasi yang cepat seringkali beriringan dengan peningkatan pengangguran karena infrastruktur dan kesempatan kerja yang tidak tumbuh sebanding dengan pertumbuhan populasi. Adapun kondisi di Kabupaten Lampung Utara dan

Lampung Selatan mengalami migrasi netto yang lebih rendah dibandingkan Bandar Lampung, yang dapat menjelaskan TPT yang lebih rendah. Lampung Selatan, yang berada lebih dekat dengan wilayah industri dan pertanian yang besar, mungkin menyediakan lebih banyak lapangan kerja untuk penduduknya.

Secara sosial dan ekonomi, Bandar Lampung memiliki TPT yang lebih tinggi kemungkinan karena urbanisasi yang cepat, diversitas ekonomi yang menghasilkan sektor kerja yang tidak stabil, dan persaingan kerja yang ketat. Hubungan ini dengan kriminalitas dapat dijelaskan melalui teori ketegangan dan pencarian alternatif untuk penghasilan, yang mencerminkan angka kriminalitas yang lebih tinggi di area dengan TPT yang tinggi. Ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan lebih banyak kesempatan kerja yang stabil dan kebijakan yang mendukung pengurangan pengangguran sebagai cara untuk mengurangi kriminalitas.

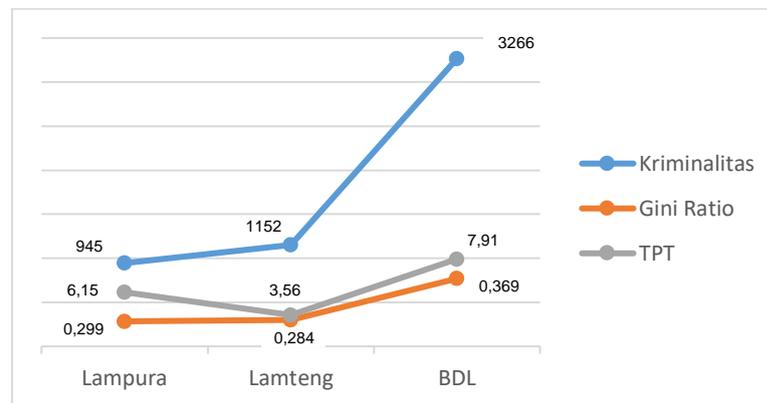
Penelitian yang mendukung penjelasan tersebut diantaranya adalah Rahmalia et al., (2016) yang menunjukkan bahwa peningkatan TPT cenderung diikuti oleh peningkatan angka kriminalitas. Sedangkan penelitian Anata, (2013), mengindikasikan bahwa kenaikan TPT memiliki dampak yang kuat pada peningkatan berbagai jenis kriminalitas, termasuk pencurian dan kekerasan, terutama di daerah perkotaan yang mengalami dampak ekonomi yang lebih berat selama resesi. Kedua penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa TPT berhubungan dengan peningkatan angka kriminalitas, yang relevan dengan situasi di Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Lampung Selatan.

Tingkat pengangguran dapat mempengaruhi angka kriminalitas. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menciptakan kondisi ekonomi yang sulit, meningkatkan tekanan pada individu untuk mencari cara-cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pengangguran dapat meningkatkan frustrasi dan ketidakstabilan sosial dan menjadi risiko peningkatan kriminalitas.

Upaya pemerintah untuk menekan angka kriminalitas, gini ratio dan pengangguran terbuka dilakukan melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan dalam laman resmi Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah; Arah kebijakan pembangunan, capaian pertumbuhan ekonomi pada angka 4.5% sampai 5.5%, Indek Pembangunan Manusia 70.6-70.9, TPT turun dari 4.0 hingga 3.8%, Rasio Gini 0.293-0.314, tingkat kemiskinan juga turun dari 11.4

hingga 10.9%, kemudian inflasi 3+1%, serta pendapatan perkapita pada angka 45 hingga 46 juta. Selanjutnya, strategi stabilisasi ekonomi dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah, optimalisasi belanja konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan kualitas belanja pemerintah.

Faktanya kebijakan tersebut masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka kriminalitas. Berdasarkan data yang sudah ditampilkan sebelumnya dapat digambarkan dalam bentuk grafik bagaimana kecenderungan peningkatan tiga unsur tersebut. Grafik tersebut adalah:



Gambar 4. Angka kriminalitas, Gini Ratio dan TPT di Lampung Utara, Lampung Tengah dan Bandar Lampung

Gambar 4 menunjukkan gambaran tentang perkembangan angka kriminalitas, rasio gini dan TPT tahun 2022 di tiga (3) kabupaten yang memiliki angka tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. Grafik tersebut mengindikasikan pola bahwa tiga kabupaten dengan rasio Gini dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi, cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, wilayah dengan rasio Gini dan TPT yang lebih rendah umumnya menunjukkan tingkat kriminalitas yang lebih rendah.

Hubungan antara variabel-variabel ini bersifat kompleks, dan hasilnya dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis, budaya, dan waktu. Beberapa studi telah menemukan adanya korelasi antara ketidaksetaraan ekonomi dan angka kriminalitas, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu konsisten. Penjelasan dan penelitian serupa memberikan bukti empiris yang mendukung hubungan antara gini ratio dan TPT dengan angka kriminalitas.

Banyak penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan topik yang sama namun ada kesenjangan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti masalah masalah sosial yang bersifat dinamis sehingga perlu ada perubahan periode waktu penelitian seiring dengan perubahan kebijakan terbaru. Oleh karenanya penentuan periode waktu dari 2019-2022 adalah masa di mana Indonesia secara umum mengalami guncangan sosial dan ekonomi karena merebaknya Covid-19. Situasi tersebut merubah kebiasaan sosial dan pergerakan ekonomi.

Selain ketimpangan pendapatan dan TPT, tingkat pendidikan dan PDRB memiliki peran penting sebagai faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi kejadian kriminal. Pendidikan berfungsi sebagai faktor protektif terhadap kriminalitas. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki keterampilan yang lebih baik untuk memasuki pasar kerja, yang pada akhirnya mengurangi insentif untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Kurangnya akses terhadap pendidikan dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga meningkatkan risiko keterlibatan dalam kejahatan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pendidikan menanamkan nilai sosial positif, sehingga berkontribusi pada perilaku yang lebih baik. Data tingkat pendidikan di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam persentase)

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan											
		SD				SMP				SMA			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	108,0	109,3	109,1	108,3	84,3	83,2	83,2	86,0	70,7	71,0	71,0	75,7
2	Tanggamus	114,2	115,5	116,7	116,7	104,9	104,9	105,0	105,0	75,4	76,1	76,2	80,8
3	Lampung Selatan	104,8	102,9	102,1	102,8	93,5	93,01	95,3	83,7	74,8	76,1	79,5	78,8
4	Lampung Timur	105,6	105,8	105,8	106,0	96,8	96,8	97,5	96,2	84,5	84,6	85,3	85,7
5	Lampung Tengah	104,1	104,3	104,8	105,9	90,6	90,6	91,5	91,9	94,9	94,7	95,0	94,8
6	Lampung Utara	110,0	110,2	109,6	109,7	90,0	93,8	92,3	92,9	81,0	80,4	83,3	81,8
7	Way Kanan	109,5	108,1	109,0	108,2	87,5	85,9	88,0	87,0	88,9	85,2	60,8	87,9
8	Tulang Bawang	111,6	109,7	109,9	110,0	95,4	97,1	96,6	93,4	65,4	65,0	68,7	67,2
9	Pesawaran	106,8	108,0	105,7	106,5	90,3	90,1	92,0	91,7	92,3	91,9	91,6	93,2
10	Pringsewu	103,7	104,8	103,3	104,8	96,7	109,5	96,0	94,5	76,5	76,3	77,3	78,8
11	Mesuji	105,0	107,3	107,6	108,3	97,5	90,3	89,9	101,1	70,9	71,2	70,4	71,2
12	Tlmg Bawang Barat	108,7	109,9	108,3	109,9	99,3	101,7	100,2	99,6	70,9	64,3	71,8	71,2
13	Bandar Lampung	105,3	105,6	105,0	105,9	87,9	91,7	91,8	91,9	113,0	111,0	116,1	116,2
14	Metro	102,2	102,2	101,6	101,7	95,5	95,2	96,9	101,0	91,9	91,6	95,0	96,5

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Tabel 4 menggambarkan bahwa tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA di kabupaten/kota Provinsi Lampung dari 2019 hingga 2022. Secara umum, tingkat Pendidikan SD cenderung stabil di atas 100%, mencerminkan akses pendidikan dasar yang luas, meskipun terdapat variasi antar daerah. Di jenjang SMP angkanya menurun tetapi masih menunjukkan tren positif di beberapa wilayah seperti Tanggamus. Sementara itu, pendidikan SMA lebih rendah dibanding jenjang sebelumnya, dengan perbedaan signifikan antar daerah, mengindikasikan tantangan keberlanjutan pendidikan, seperti putus sekolah atau keterbatasan akses.

Fenomena ini menggambarkan kesenjangan partisipasi pendidikan, terutama di jenjang SMA. Tingkat pendidikan yang rendah dapat berkontribusi pada peluang kerja yang terbatas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam aktivitas kriminal. Dalam kaitannya dengan angka kriminalitas, daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah, berpotensi menghadapi tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan pendidikan lebih baik. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan akses pendidikan untuk mengurangi kriminalitas melalui pembangunan sumber daya manusia.

Adapun PDRB mencerminkan kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Peningkatan PDRB biasanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, lebih banyak lapangan kerja, dan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat. Ketika kesejahteraan ekonomi meningkat, tekanan untuk terlibat dalam aktivitas kriminal cenderung berkurang. Sebaliknya, daerah dengan PDRB rendah seringkali menghadapi kesenjangan ekonomi dan sosial yang lebih besar, yang dapat memicu angka kriminalitas lebih tinggi karena keterbatasan kesempatan ekonomi yang tersedia bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan dan PDRB memiliki keterkaitan yang signifikan dengan angka kriminalitas. Keduanya merupakan elemen penting yang membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya tindak kriminal. Adapun data tentang PDRB di Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 5. PDRB Perkapita di Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 (dalam angka)

No	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota (milyar)			
		2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	4.987,66	4.926,30	5.053,32	5.260,71
2	Tanggamus	10.874,10	10.679,82	10.929,22	11.384,34
3	Lampung Selatan	30.277,17	29.743,30	30.541,28	32.039,61
4	Lampung Timur	29.635,03	28.931,29	29.001,20	29.586,00
5	Lampung Tengah	47.937,70	47.347,97	48.710,04	50.973,45
6	Lampung Utara	16.515,06	16.269,34	16.727,89	17.256,56
7	Way Kanan	9.577,80	9.462,31	9.736,50	10.165,60
8	Tulang Bawang	15.847,23	15.614,89	16.064,50	16.694,18
9	Pesawaran	11.408,41	11.258,77	11.493,29	12.016,35
10	Pringsewu	7.744,56	7.647,66	7.870,13	8.214,16
11	Mesuji	7.008,11	6.911,12	7.107,31	7.355,55
12	Tulang Bawang Barat	7.866,46	7.747,24	7.970,78	8.328,39
14	Bandar Lampung	39.405,27	38.632,20	39.830,38	41.800,07
15	Metro	4.314,15	4.235,00	4.358,39	4.554,79

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Tabel 5 menunjukkan bahwa PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari 2019 hingga 2022. Kabupaten Lampung Tengah memiliki PDRB per kapita tertinggi, diikuti oleh Bandar Lampung dan Lampung Selatan, yang mencerminkan kontribusi ekonomi yang signifikan dari sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sebaliknya, kabupaten seperti Metro, Mesuji, dan Lampung Barat memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah, menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih terbatas, sering kali didominasi sektor primer seperti pertanian.

Kondisi ekonomi ini berkaitan erat dengan angka kriminalitas di mana dapat dikatakan daerah dengan PDRB per kapita tinggi dapat memiliki risiko kriminalitas terkait urbanisasi dan ketimpangan sosial, meskipun memiliki kapasitas untuk menyediakan lebih banyak peluang ekonomi. Sebaliknya, daerah dengan PDRB per kapita rendah mungkin menghadapi tingkat kriminalitas yang dipicu oleh keterbatasan akses ekonomi dan pekerjaan, yang mendorong individu mencari alternatif yang tidak legal. Pemerataan pembangunan ekonomi di setiap wilayah menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan dan menekan angka kriminalitas secara menyeluruh.

Rentang waktu penelitian yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022 merupakan periode yang tidak terlepas dari dinamika besar akibat pandemi Covid-19. Pandemi memberikan dampak luas, baik secara langsung maupun tidak

langsung, terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi di Provinsi Lampung. Ketimpangan pendapatan berpotensi mengalami pelebaran selama masa pandemi, karena kelompok masyarakat berpendapatan rendah lebih terdampak secara ekonomi, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi relatif memiliki akses dan kemampuan adaptasi yang lebih baik. Kondisi ini memperbesar disparitas sosial dan ekonomi yang dapat berimplikasi terhadap meningkatnya angka kriminalitas, terutama kriminalitas berbasis kebutuhan ekonomi.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan peningkatan sebagai konsekuensi dari menurunnya kegiatan ekonomi dan terbatasnya serapan tenaga kerja selama pandemi. Pengangguran yang meluas dapat mendorong ketidakstabilan sosial dan meningkatkan potensi perilaku menyimpang di masyarakat. Di sisi lain, pandemi juga memengaruhi akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Ketimpangan dalam pendidikan ini tidak hanya berdampak pada capaian pendidikan jangka pendek, tetapi juga berpengaruh terhadap ketimpangan kesempatan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merefleksikan kapasitas ekonomi daerah mengalami tekanan yang cukup signifikan, terutama di sektor-sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan industri pengolahan yang banyak menyerap tenaga kerja.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, kondisi pandemi menjadi konteks penting yang memperkuat relevansi penelitian ini. Analisis terhadap pengaruh ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan, dan PDRB terhadap angka kriminalitas tidak dapat dilepaskan dari latar krisis yang mewarnai periode penelitian. Hal ini memberikan dasar yang lebih kuat dalam menjelaskan keterkaitan antarvariabel serta memperkuat urgensi untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti yang mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi di era pasca pandemi.

Penentuan variabel ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, pendidikan dan PDRB terhadap angka kriminalitas berdasarkan pertimbangan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi tingkat kriminalitas. Data tentang kriminalitas yang tinggi di Provinsi Lampung cukup memberikan gambaran fenomena yang perlu dianalisis. Penelitian terdahulu

mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi dan kebijakan terbaru yang ada di Lampung. Melakukan penelitian baru dapat memberikan wawasan tentang dampak kebijakan terbaru dan perubahan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, pengangguran, pendidikan, PDRB dan kriminalitas. Penelitian sebelumnya menggunakan data dan metode yang berbeda atau kurang mutakhir, sedangkan penelitian ini memanfaatkan data terbaru dan metode analisis yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi saat ini.

Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya menunjukkan hubungan antarvariabel secara parsial, penelitian ini menganalisis keterkaitan simultan antara ketimpangan pendapatan, pengangguran, pendidikan, PDRB, dan kriminalitas dalam konteks spesifik Provinsi Lampung. Analisis kontekstual ini memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya penurunan kriminalitas dan pengentasan kemiskinan secara efektif.

Meskipun demikian, hubungan ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial, dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis keterkaitan antara rasio gini dan pengangguran terhadap angka kriminalitas. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan fenomena empiris pengaruh ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan, PDRB terhadap angka kriminalitas di Provinsi Lampung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Uraian yang disajikan pada latar belakang mengarahkan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan, PDRB secara parsial atau simultan terhadap angka kriminalitas di Provinsi Lampung 2019-2022
2. Bagaimanakah mengklasifikasi angka kriminalitas berdasarkan ketimpangan pendapatan, TPT, meningkatkan pendidikan, dan PDRB di Provinsi Lampung 2019-2022 melalui pendekatan tipologi

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah, definisi masalah dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan, PDRB secara parsial atau simultan terhadap angka kriminalitas di Provinsi Lampung 2019-2022
2. Menganalisis angka kriminalitas berdasarkan ketimpangan pendapatan, TPT, meningkatkan pendidikan, dan PDRB di Provinsi Lampung 2019-2022 melalui pendekatan tipologi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah

Sebagai dasar yang dapat difungsikan dalam pengambilan kebijakan untuk menurunkan angka kriminalitas, menurunkan ketimpangan pendapatan, TPT meningkatkan tingkat pendidikan dan PDRB di Provinsi Lampung,

2. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan penulisan tentang bagaimana ketimpangan pendapatan dan TPT serta pengaruhnya terhadap angka kriminalitas di Provinsi Lampung (2019-2022)

3. Bagi pihak lain

Mengetahui ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan dan PDRB serta pengaruhnya terhadap angka kriminalitas di Provinsi Lampung.

## II. LANDASAN TEORI

### 2.1 Peran Pemerintah

Peran pemerintah daerah dalam menurunkan gini ratio (ukuran ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan) dan TPT di wilayahnya dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah:

1. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti menggencarkan investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, seperti industri kreatif, pariwisata, pertanian, dan sektor manufaktur. Ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja lokal, sehingga mereka lebih siap untuk mengisi pekerjaan yang tersedia. Program-program ini dapat mencakup pelatihan vokasional, kursus keterampilan, dan pendidikan tinggi yang terjangkau.
3. Mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UKM dapat menjadi strategi efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan teknis, akses ke pasar, serta fasilitas keuangan untuk membantu UKM berkembang.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dengan menaikkan tarif pajak untuk orang kaya dan mengurangi pajak bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, program transfer pendapatan seperti bantuan sosial, tunjangan anak, atau subsidi perumahan juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.
5. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi publik, dan akses internet dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke wilayah yang terpencil atau kurang berkembang. Hal ini dapat membuka peluang ekonomi baru dan memperluas pasar kerja.

6. Pemerintah daerah dapat mengembangkan program kesehatan dan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Kesehatan yang baik dan keamanan sosial dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
7. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat dalam mengembangkan solusi untuk mengurangi ketidaksetaraan dan pengangguran. Kemitraan ini dapat mencakup program pelatihan kerja, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan (Balitbangda Prov Lampung, 2023).

Dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program ini secara komprehensif dan terkoordinasi, pemerintah daerah dapat berperan penting dalam menurunkan Gini ratio dan TPT di wilayahnya. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat serta mengukur secara berkala efektivitas kebijakan yang diterapkan (Balitbangda Prov Lampung, 2023).

Selain strategi yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa langkah tambahan yang dapat diambil oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk meminimalisasi dampak ketimpangan dan pengangguran terhadap tindak kriminalitas:

1. Untuk mengatasi akar penyebab kriminalitas, pemerintah dapat mengembangkan program rehabilitasi untuk mantan narapidana atau individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan psikologis untuk membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif.
2. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan mengurangi faktor-faktor risiko yang berkontribusi pada kriminalitas. Pemerintah dapat mengadakan dialog dan konsultasi dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka dan merancang kebijakan yang sesuai.
3. Memperkuat sistem peradilan pidana dengan memastikan adanya proses yang transparan, cepat, dan adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap keadilan. Hal ini dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindak kriminalitas sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sistem.

4. Program pendidikan dan kampanye kesadaran publik tentang konsekuensi hukum dari tindak kriminalitas serta nilai-nilai positif dalam masyarakat dapat membantu mengubah perilaku dan sikap yang mendukung kejahatan (Balitbangda Prov Lampung, 2023).

Dengan menggabungkan berbagai strategi ini dalam rencana aksi yang komprehensif, pemerintah Provinsi Lampung dapat mengurangi dampak ketimpangan dan pengangguran terhadap angka kriminalitas di wilayahnya. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2.2 Ketimpangan**

Ketimpangan merujuk pada perbedaan dalam tingkat pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga di suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh produktivitasnya (Todaro & Smith, 2011). Ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terjadilah ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan rendah hanya diterima oleh sejumlah kecil penduduk, sementara sebaliknya, pendapatan yang tinggi hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Dengan kata lain, perbedaan besar dalam jumlah pendapatan antara berbagai lapisan masyarakat hanya dirasakan oleh kelompok tertentu saja. Todaro & Smith, (2011) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat mengakibatkan dampak-dampak tertentu, termasuk:

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi.
2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.
3. Ketimpangan pendapatan umumnya dianggap tidak adil.

Ketimpangan pendapatan dapat dinilai melalui metode pengukuran yang dikenal sebagai Gini Ratio. Indeks Gini merupakan indikator agregat yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi dan memiliki rentang nilai antara nol hingga satu. Nilai Indeks Gini nol (0) menunjukkan bahwa tidak ada ketimpangan pendapatan yang ada, yang mengindikasikan pemerataan

sempurna dalam distribusi pendapatan. Sebaliknya, jika nilai Indeks Gini mencapai satu (1), itu menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang sempurna, yang berarti seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu atau kelompok saja Todaro dan Smith (2016).

Indeks Gini ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisis tingkat ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat, dan juga sebagai indikator derajat keadilan dalam suatu negara yang digunakan oleh pemerintah. Rumus menghitung nilai Rasio Gini atau Indeks Gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut:

$$GR=1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(F_{ci} + F_{ci-1})$$

Keterangan:

GR = Koefisien Gini

$f_{pi}$  = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$FC_i$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$FC_{i-1}$  = frekuensi kumulatif total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Menurut Todaro dan Smith (2016), ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkat, yaitu ketimpangan rendah, ketimpangan sedang, dan ketimpangan tinggi. Tingkat ketimpangan ini berkaitan dengan nilai Indeks Gini yang digunakan sebagai ukuran. Di negara-negara dengan tingkat ketimpangan tinggi, nilai Indeks Gini berkisar antara 0.50 hingga 0.70. Sementara itu, negara-negara dengan distribusi pendapatan yang lebih merata memiliki nilai Indeks Gini antara 0.20 hingga 0.35. Untuk negara-negara dengan nilai Indeks Gini sekitar 0.4, ini mengindikasikan tingkat distribusi pendapatan yang relatif timpang di dalamnya. Arti nilai dari besaran Rasio Gini adalah  $G < 0,3$  artinya ketimpangan rendah, besaran nilai  $0,3 \leq G \leq 0,5$  artinya ketimpangan sedang, Adapun besaran nilai  $> 0,5$  artinya ketimpangan tinggi (Todaro dan Smith, 2016).

## 2.3 Tingkat Pengangguran

### 2.3.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikatorr ketenagakerjaan, pengangguran adalahh orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau orangg yang tidakk mencari pekerjaann karena sudah mendapat pekerjaan tetapi tidak bekerja. mulai bekerja.

Menurut (Sukirno, 2000) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari kerja, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya seperti tindak kejahatan.

Pengangguran mempunyai kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah Indonesia mengingat indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan agar tidak terjadi masalah-masalah sosial Setiadi & Kolip, (2010). Usaha-usaha untuk mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan yang lebih demokratis menyangkut hak-hak memilih pekerjaan, lapangan pekerjaan, lokasi pekerjaan sesuai kemampuan, kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi (Sukirno, 2016).

Pengangguran adalah seseorang yang ingin mendapat pekerjaan termasuk angkatan kerja yang berusia 15 sampai 64 tahun tetapi belum bisa memperoleh pekerjaan (Naf'an, 2014). Pengangguran adalah seseorang yang ingin mendapat pekerjaan termasuk angkatan kerja yang berusia 15 sampai 64 tahun tetapi belum bisa memperoleh pekerjaan (Naf'an, 2014)

Pengangguran menurut Djohanputro, (2016) adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (atau mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya (menemukannya). Menurut Sukirno, (2000), Menjelaskan pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah dimana orang yang sudah termasuk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari kerja.

Pengangguran yang terjadi didalam suatu perekonomian dapat memiliki dampak atau akibat buruk baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat. Salah satu dampak buruk pengangguran terhadap perekonomian yaitu menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang

mungkin dicapainya (Mankiw, 2003). Dengan demikian, mereka masih memiliki pendapatan untuk membiayai kehidupannya dari keluarganya. Mereka tidak perlu bergantung kepada tabungan atau bantuan orang lain. Namun dinegara berkembang tidak terdapat asuransi pengangguran dengan begitu kehidupan pengangguran harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman dari orang lain.

### **2.3.2 Jenis-Jenis Pengangguran**

#### **1. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:**

##### **a. Pengangguran friksional**

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara dalam mencocokkan pencari kerja dengan lowongan yang ada. Kesulitan sementara ini mungkin diakibatkan oleh waktu yang dibutuhkan selama proses aplikasi dan seleksi atau dari jarak atau kurangnya informasi (Pyle, 2019).

##### **b. Pengangguran siklikal**

Pengangguran ini disebabkan oleh penurunan permintaan agregat, yang dapat disebabkan oleh penurunan harga komoditas, memaksa perusahaan untuk mem-PHK pekerjaa, yang menyebabkan pengangguran (Mankiw, 2003).

##### **c. Pengangguran struktural**

Penganggurann ini terjadi karenaa adanya masalah dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktural tersebut memerlukan perubahan keterampilan yang dibutuhkan tenaga kerja, sementara pencari kerja tidak dapat beradaptasi dengan keterampilan baru ini.

##### **d. Pengangguran Teknologi**

Pengangguran juga dapat disebabkan oleh penggantian tenaga manusia dengan mesin dan bbahan kimia. Gulma dan rerumputan beracun, misalnya, telah mengurangi kebutuhan pekerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahann pertanian lainnya (Naf'an, 2014).

#### **2. Pengangguran Berdasarkan Ciri-Cirinya**

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi menjadi empat kelompok :

##### **a. Pengangguran Terbuka**

Pengangguran ini merupakan angkatan kerja yang benar- benar tidak

memiliki pekerjaan karena penambahan lapangan kerja lebih sedikit daripada penambahan angkatan kerja.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Di negara berkembang sering didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatan dengan efisien.

c. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak berkinerja terbaik karena suatu alasan. Di negara-negara berkembang, sering dijumpai bahwa tenaga kerja suatu perekonomian melebihi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan kegiatannya.

d. Setengah Menganggur

Ada seseorang yang tidak menganggur tetapi tidak bekerja penuh waktu dan jam kerjanya jauh lebih rendah dari biasanya. Biasanya, tenaga kerja semi-pengangguran ini adalah yang bekerja <35 jam per minggu (Naf'an, 2014).

Saat melihat pengangguran, yang diperhitungkan bukanlah jumlah pengangguran, melainkan tingkat pengangguran sebagai persentase dari angkatan kerja. Untuk melihat keterjangkauan tenaga kerja (kesempatan kerja), digunakan rumus TPT. Pengertian TPT adalah persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin memperoleh pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi tidak memulai pekerjaan tenaga kerja yang ada (Sukirno, 2016).

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah angka yang menunjukkan jumlah pengangguran dalam kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, baik yang baru pertama kali bekerja maupun yang sedang bekerja. Sedangkan pekerja yang tergolong setengah menganggur adalah mereka yang masih mencari pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu dan mereka yang bekerja dengan jam kerja pendek (kurang dari sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu).

Namun tetap bersedia menerima pekerjaan tersebut demikian pula mereka yang tidak mencari pekerjaan tetapi bersedia menerima pekerjaan tersebut. Karyawan digolongkan sebagai penganggur berat (*severely underemployed*) jika dianggap setengah menganggur dengan jam kerja kurang 25 jam per minggu (Sukirno, 2016).

Menurut BPS (2023), Pengangguran terbuka terdiri atas:

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha
3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja

Pengangguran berakibat buruk pada dua aspek. Yaitu aspek perekonomian dan individual atau masyarakat:

- 1) Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak semakin sedikit.
- c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.

- 2) Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:

- a. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Berbeda dengan negara maju, dimana para pengangguran di sana tetap diberikan asuransi untuk melanjutkan kehidupannya. Sedangkan di negara berkembang, mereka harus membiayai kehidupan selanjutnya dan bergantung pada tabungan masa lalu atau pinjaman.
- b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Karena keterampilan akan tetap hidup bila terus dipraktikkan atau digunakan. Sehingga pengangguran dalam periode yang sangat lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerja semakin merosot.
- c. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan perekonomian yang lesu dan pengangguran yang tinggi akan mengikis rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah, dan adakalanya akan diikuti oleh demonstrasi dan huru hara. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal (pencurian dan perampokan) juga akan meningkat (Sukirno, 2016)

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran, kiranya pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk tenaga kerja agar seluruhnya terserap dan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, bagi penganggur kiranya dapat mengasah skill dan keterampilan sehingga dapat terserap ke pasar tenaga kerja yang dewasa ini memerlukan keahlian professional.

## **2.4 Pendidikan**

### **2.4.1 Pengertian**

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan upaya untuk mendatangkan proses pembelajaran bagi siswa agar dapat memajukan potensi dan dapat mempunyai kepribadian yang baik, kecerdasan, berakhlak mulia serta memiliki keterampilan dengan arti lain, pendidikan merupakan bekal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan orang yang berpendidikan rendah oleh karena itu pendapatan seseorang meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan (Ahmadi, 2014).

### 2.4.2 Teori-Teori Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam perkembangan sosial ekonomi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Teori pendidikan ditinjau dari aspek sosial ekonomi menyoroti bagaimana pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial, ketimpangan, serta perkembangan ekonomi dan sosial.

1. Teori *Human Capital* oleh Gary S. Becker (1964):

Teori ini menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi dalam modal manusia, yang akan meningkatkan produktivitas individu dan, pada akhirnya, pendapatan mereka. Pendidikan memberi individu keterampilan dan pengetahuan yang dapat mereka gunakan untuk berkontribusi pada pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan peluang ekonomi. Becker juga menjelaskan bahwa pendidikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan produktif, yang kemudian meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara.

2. Teori Mobilitas Sosial oleh Blau dan Duncan (1967)

Teori ini menekankan bahwa pendidikan adalah alat utama untuk mobilitas sosial vertikal. Individu dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, mereka memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan stabilitas ekonomi yang lebih besar. Ini membantu mengurangi ketimpangan sosial dalam jangka panjang.

3. Teori Ketergantungan oleh Paulo Freire (1970)

Dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed*, Freire mengkritik bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk mempertahankan status quo dan memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menekankan perlunya pendidikan yang membebaskan, di mana individu tidak hanya dididik untuk bekerja dalam sistem yang ada, tetapi juga untuk mengkritisi dan mengubah sistem sosial yang tidak adil. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai alat untuk transformasi sosial, bukan hanya mobilitas ekonomi.

4. Teori Ketidaksetaraan Struktural oleh Pierre Bourdieu (1977)

Bourdieu menekankan bahwa pendidikan sering kali memperkuat ketimpangan sosial yang ada. Ia memperkenalkan konsep "*capital cultural*" (modal budaya),

di mana anak-anak dari keluarga yang lebih makmur memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dan dukungan budaya yang lebih kuat untuk sukses di sekolah. Ini menyebabkan reproduksi ketidaksetaraan sosial, di mana pendidikan tidak selalu menjadi alat mobilitas sosial, tetapi sering kali memperkuat perbedaan kelas yang ada.

### 2.4.3 Pengukuran Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur tingkat pendidikan dapat diimplementasikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

#### 1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu (misalnya, sekolah dasar, menengah, atau tinggi) terhadap total populasi penduduk pada kelompok usia yang sesuai untuk jenjang tersebut. APK dapat menunjukkan seberapa banyak anak-anak atau remaja yang mengikuti pendidikan, tanpa memperhitungkan apakah mereka berada di kelompok usia ideal atau tidak.

$$APK = \left( \frac{\text{jumlah siswa pada jenjang pendidikan}}{\text{total penduduk usia yang sesuai}} \right)$$

#### 2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM mengukur proporsi siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia ideal mereka. APM lebih akurat dalam melihat keberhasilan sistem pendidikan dalam mempertahankan siswa sesuai dengan jenjang dan usia.

$$APM = \left( \frac{\text{jumlah siswa usia yang sesuai pada jenjang pendidikan tertentu}}{\text{total penduduk usia yang sesuai}} \right)$$

APM memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ketercapaian pendidikan bagi kelompok usia yang seharusnya berada di jenjang pendidikan tertentu.

## 2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

### 2.5.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah adalah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh entitas ekonomi di suatu wilayah pedalaman. Atau merupakan penjumlahan nilai total produk dan jasa

akhirnya yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Indikator penting untuk dapat mengetahui keadaan ekonomi suatu daerah selama periode tertentu adalah berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah yang dapat digunakan dengan harga berlaku atau harga konstan.

1. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dari harga tahun berjalan dan digunakan untuk menentukan kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur perekonomian daerah suatu daerah.
2. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung dengan menggunakan harga barang pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi riil dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Menurut Tarigan (2018), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (Riyanto, 2016) Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden.

PDRB merupakan data statistika atas pertumbuhan maupun tingkat pendapatan masyarakat yang merangkum keseluruhan akibat dari kegiatan ekonomi yang berupa perolehan nilai tambah, selama periode waktu tertentu di suatu wilayah. PDRB juga berguna sebagai alat yang dapat menjadikan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi, pemahaman atas akibat dari fenomena yang terjadi, maupun bahan kajian atas rencana pembangunan selanjutnya baik dalam sektor nasional maupun regional yang melibatkan pemerintah pusat atau daerah, termasuk swasta (Badan Pusat Statistik, 2018)

### **2.5.2 Kegunaan PDRB**

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian pada suatu wilayah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.
2. PDRB harga konstan (riil) digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap katagori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan stuktur perekonomian atau peranan setiap katagori ekonomi suatu wilayah.
4. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB persatu orang penduduk.
5. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu negara.

### 2.5.3 Pendekatan Perhitungan PDRB

Untuk menghitung angka PDRB, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan output, pendekatan pendapatann, dan pendekatan pengeluaran:

#### 1. Pendekatan Produksi

Menghitung jumlah nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan lain lain. Nilai tambah dihitung sebagai selisih antara total output dan input antara yang digunakan dalam produksi.

$$\text{PDRB} = \Sigma (\text{Output} - \text{Input Antara})$$

#### Keterangan

Output = Total produksi suatu sektor

Input Antara = Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi.

#### 2. Pendekatan Pengeluaran

Menghitung jumlah pengeluaran akhir oleh rumah tangga, pemerintah, investasi (pembentukan modal tetap bruto), dan ekspor bersih (ekspor dikurangi impor).

$$\text{PDRB} = \text{Konsumsi} + \text{Investasi} + \text{Pengeluaran Pemerintah} + (\text{Ekspor} - \text{Impor})$$

#### 3. Pendekatan Pendapatan

Menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi dalam proses produksi di suatu wilayah. Ini mencakup upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan laba usaha.

$$\text{PDRB} = \text{Upah Tenaga Kerja} + \text{Sewa} + \text{Bunga} + \text{Laba Usaha} + \text{Penyusutan} + \text{Pajak Tidak Langsung Neto}$$

## **2.6 Kriminalitas**

### **2.6.1 Pengertian Kriminalitas**

Pengertian kriminal menurut bahasa sama dengan kejahatan, yaitu perbuatan yang dapat diancam dengan undang-undang. Secara sosiologis kejahatan atau kriminalitas adalah setiap tingkah laku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materil psikologis dan mengganggu kehidupan bermasyarakat. Kejahatan akan selalu terjadi dimana-mana dan kejahatan harus diberantas karena menurut ilmu hukum kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, kejahatan bersifat universal dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja (Wignjosoebroto, 2003). Sebagai fenomena sosial, kejahatan merupakan penyakit dalam masyarakat dan keberadaannya harus diperangi, sebagaimana ilmu hukum memerangi kejahatan karena kejahatan, sedangkan kejahatan secara hukum berarti setiap perbuatan atau perilaku manusia yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dan diakui sebagai sesuatu yang dapat dipidana oleh undang-undang dan diatur oleh hukum pidana (Hardijanto & Qomar, 2018).

Kriminal atau kejahatan mempunyai pengertian secara yuridis-formal dan sosiologis, Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat asosial, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana, Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (Hardijanto & Qomar, 2018).

Kejahatan juga memiliki arti dari perspektif ekonomi, yaitu seseorang yang dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain, Kejahatan bersifat universal dan tidak terbatas ruang dan waktu karna dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja, Sebagai sebuah fenomena sosial, kejahatan adalah penyakit dalam sebuah komunitas dan keberadaannya harus diperangi, sebagaimana ilmu hukum memerangi kejahatan

karena merupakan sebuah pelanggaran. Edwart & Azhar, (2019) melihat kejahatan dari beberapa perpektif sebagai berikut:

- a, Kejahatan sebagai masalah sosial  
 Bila dilihat dari sudut sosiologi, kejahatan adalah salah satu masalah paling gawat dari disorganisasi sosial, Karena penjahat bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum atau undang-undang, ketertiban dan kesejahteraan sosial,
- b, Kejahatan sebagai masalah psikologi  
 Dari sudut psikologi, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjahat, Penjahat adalah orang yang sama dengan kita, yang memiliki masalah psikologi,
- c, Kejahatan sebagai masalah sosial-psikologi  
 Kelakuan seorang penjahat bila dilihat dari sudut pandang masyarakat adalah suatu kelakuan yang menyeleweng, Akan tetapi, penyebab perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang secara terus menerus adalah perasaan anti sosial yang ada pada diri penjahat, Sebagai individu si penjahat adalah suatu masalah psikologis, tetapi mereka juga suatu masalah sosial, karena kegagalan mereka untuk mentaati undang-undang,
- d, Kejahatan sebagai masalah sosial-hukum  
 Definisi kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan/kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan, yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang, Melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau gagal melakukan perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang akan mengakibatkan pidana dalam bentuk denda/hukuman, hilang kemerdekaan, dibuang keluar daerah, pidana mati, dan lain-lain (Wignjosoebroto, 2003)

Dalam kriminologi, kejahatan dapat dibagi dengan beberapa klasifikasi yaitu kejahatan terhadap nyawa dengan jenis kejahatan pembunuhan, kejahatan terhadap fisik/badan dengan jenis kejahatan penganiayaan berat, penganiayaan ringan dan kekerasan dalam rumah tangga, lalu kejahatan terhadap kesusilaan dengan jenis kejahatan seperti pemerkosaan, pencabulan, Lalu kejahatan terhadap kemerdekaan orang dengan jenis kejahatan penculikan, memperkerjakan anak dibawah umur, selanjutnya kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan

dengan jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan senjata api, pencurian dengan senjata tajam, Lalu kejahatan terhadap hak milik/barang dengan jenis kejahatan pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan barang, pembakaran barang dan penadahan, kejahatan narkoba dan lain sebagainya Cerdá et al., (2018)

Ilmu ekonomi memandang kejahatan sebagai fenomena yang harus diberantas disebabkan dampaknya yang menimbulkan banyak biaya baik secara materil maupun non-materil, Sedangkan kerangka ekonomi merupakan salah satu pendekatan yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya dalam memberantasnya. Kejahatan dapat memunculkan keengganan pihak asing dan domestik untuk berinvestasi langsung, mengurangi daya saing perusahaan, dan menghambat pembangunan.

### **2.6.2 Jenis- jenis Kriminalitas**

Jenis-jenis kriminilias secara garis besar menurut Sjafrizal, (2018) adalah sebagai berikut:

- a. *Brown Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).
- b. *Insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid
- c. *Occasional criminal* atau crim inaloid yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. *Riminals ofppassion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

### **2.6.3 Faktor-faktor Penyebab Kriminalitas**

Menurut Simadjuntak (2019) kejahatan atau kriminalita dapat ditimbulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

#### **3. Faktor Demografi (Pertumbuhan Penduduk)**

Faktor Demografi yang dibuktikan dengan data kependudukan dan kepadatan penduduk berkorelasi dengan angka kriminalitas. Hal ini terjadi karena semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin ketat persaingan antar manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran)

Faktor ekonomi, termasuk kemiskinan dan pengangguran, merupakan faktor yang membuat seseorang mudah terlibat dalam kejahatan bahkan tergolong serius. Tingkat pengangguran yang tinggi tersebut dapat memperumit masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok, yang pada akhirnya berujung pada jalan pintas bahkan melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, dan juga tindak pidana didominasi oleh orang-orang miskin yang tidak mampu mencari nafkah individu-individu yang berada dalam tekanan untuk hidup dalam kemiskinan atau dalam hal ini mereka adalah orang-orang miskin mendorong mereka untuk melakukan pencurian sehingga kemiskinan meningkat secara positif mendorong untuk melakukan kriminal.

5. Faktor sosial (keluarga, pendidikan, politik dan agama)

a. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan individu, oleh karena itu tempat pertama pembentukan karakter ada pada keluarga itu sendiri, oleh karena itu keluarga merupakan tempat pertama dalam pembentukan karakter seseorang. Keluarga dengan keluarga berantakan menyebabkan kebanyakan orang melakukan kejahatan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua, yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan seseorang.

b. Tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang memudahkan terjadinya pembunuhan tingkat pertama. Tingkat pendidikan berpotensi membentuk kepribadian seseorang untuk hidup lebih bertanggung jawab. Ketika upaya orang tua dalam keluarga gagal, orang tersebut rentan terhadap kenakalan, yang dapat terjadi dalam keluarga dan masyarakat di mana mereka berada.

c. Politik

Politik merupakan salah satu penyebab kejahatan dari sudut pandang politik, pengangguran mempengaruhi dunia politik karena dapat mengakibatkan maraknya demonstrasi dan membuat dunia politik menjadi tidak stabil.

d. Agama

Kurangnya pemahaman akan agama akan menyebabkan seseorang tidak memahami hukum-hukum yang diajarkan oleh agama itu sendiri dan juga kurangnya pemahaman akan menyebabkan seseorang tidak mengetahui batasan-batasan dari aturan-aturan yang ada yang akan menimbulkan kejahatan (Simadjuntak, 2019).

#### 2.6.4 Bentuk-Bentuk Tindakan Kejahatan

Tabel 7 Klasifikasi Kejahatan

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap fisik/badan	Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3	Kejahatan terhadap kesusilaan	Perkosaan Pencabulan
4	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	Penculikan mempekerjakan anak dibawah umur
5	Kejahatan terhadap hak/barang dengan penggunaan kekerasan	Pencurian dengan kekerasan Pencurian menggunakan senjata api Pencurian menggunakan senjata Tajam
6	Kejahatan terhadap hak milik/barang	Pencurian Pencurian dengan pemberatan Pengrusakan barang Pembakaran dengan sengaja Penadahan
7	Kejahatan terkait narkoba	Narkoba dan Psikotropika
8	Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi	Penipuan/ perbuatan curang Penggelapan Korupsi

Sumber : Badan Pusat Statistik

#### 2.7 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Angka Kriminalitas

Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap angka kriminalitas dapat dijelaskan secara konseptual dan didukung oleh temuan dari berbagai penelitian empiris. Secara konseptual, ketimpangan pendapatan dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas. Ketidaksetaraan yang tinggi dalam distribusi pendapatan dapat menciptakan perasaan tidak adil dan frustrasi di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Perasaan ini dapat mendorong individu untuk melanggar hukum sebagai

bentuk protes atau sebagai cara untuk mendapatkan keadilan ekonomi yang dirasakan mereka tidak dapatkan secara legal Hardijanto & Qomar, (2018).

Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung terjadinya tindak kriminalitas. Masyarakat yang merasa tidak diakui atau tidak memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat dapat lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan yang mendukung kriminalitas. Ketidaksetaraan ekonomi juga dapat mempengaruhi akses terhadap peluang ekonomi yang adil. Masyarakat yang merasa tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, atau kesempatan ekonomi lainnya mungkin lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan yang mendukung kriminalitas. Ketidaksetaraan ekonomi juga dapat mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang buruk di suatu daerah, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, atau ketidakstabilan sosial. Kondisi-kondisi ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kriminalitas (Djanggih & Qamar, (2018).

Secara empiris, banyak penelitian telah menemukan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan angka kriminalitas. Sebagai contoh, beberapa penelitian Aebi & Linde, (2012) yang meninjau bukti-bukti dari berbagai studi tentang hubungan antara ketidaksetaraan pendapatan dan angka kriminalitas. Mereka menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara ketidaksetaraan pendapatan dan angka kriminalitas, meskipun mekanisme persisnya masih belum sepenuhnya dipahami. Edwart & Azhar, (2019) mengkaji hubungan antara ketidaksetaraan pendapatan dan angka kriminalitas di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa peningkatan ketidaksetaraan pendapatan berhubungan positif dengan peningkatan angka kriminalitas, sedangkan Naibaho et al., (2020) mengkaji hubungan antara ketidaksetaraan pendapatan dan angka kriminalitas di Amerika Latin dan Karibia. Mereka menemukan bahwa ketidaksetaraan pendapatan berhubungan positif dengan angka kriminalitas di wilayah tersebut (Gould et al., 2002).

Sebuah penelitian yang dilakukan di negara Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa daerah-daerah dengan Indeks Gini yang tinggi yang termasuk dalam kategori "Daerah Berkembang Cepat" dalam tipologi , memiliki angka kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah dengan Gini

Ratio yang rendah. Ketimpangan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka kriminalitas. Sehingga ketika ketimpangan ekonomi naik maka akan diikuti dengan peningkatan angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara (Nursa Fitri et al., 2021)

Penelitian Fajnzylber et al., (2002) di Inggris mengungkapkan bahwa tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi, diukur dengan Gini Ratio, memiliki pengaruh positif yang signifikan pada angka kriminalitas, terutama dalam kejahatan sifat ekonomi seperti perampokan. Sedangkan penelitian (Goh et al., 2018) mengeksplorasi hubungan antara ketidaksetaraan ekonomi, termasuk pengukuran dengan Gini Ratio, dan angka kriminalitas di berbagai negara. Mereka menemukan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dapat berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas, terutama dalam kasus kejahatan sifat ekonomi dan kekerasan.

Hasil-hasil penelitian ini mendukung konsep bahwa ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi angka kriminalitas, meskipun hubungan tersebut kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial, dan ekonomi secara keseluruhan.

## **2.8 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Angka kriminalitas**

Pengaruh TPT terhadap angka kriminalitas dapat dijelaskan secara konseptual dan didukung oleh temuan dari berbagai penelitian empiris. Secara konseptual, TPT dapat mempengaruhi angka kriminalitas. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengurangi kesempatan ekonomi bagi individu, terutama bagi mereka yang mengalami pengangguran dalam jangka waktu yang lama. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan dapat meningkatkan tekanan ekonomi dan mengarahkan individu untuk mencari cara-cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk melalui kegiatan ilegal atau kriminal. Ketidakstabilan sosial-ekonomi di suatu daerah, yang dapat meningkatkan tingkat stres, frustrasi, dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku individu dan meningkatkan kecenderungan untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Keterbatasan akses terhadap sumber pendapatan merupakan akibat dari pengangguran yang dapat memaksa individu untuk mencari cara-cara yang tidak legal untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka.

Lingkungan sosial yang terbentuk akibat tingkat pengangguran yang tinggi dapat menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya tindak kriminalitas. Ketidakstabilan sosial dan ekonomi dapat menciptakan lingkungan di mana tindak kriminalitas dianggap sebagai alternatif yang lebih menarik atau diterima secara sosial. Secara empiris, banyak penelitian telah menemukan hubungan antara TPT dan angka kriminalitas. Penelitian Rahayu, (2010) mengembangkan model teoritis dan menemukan bukti empiris yang mendukung hubungan antara tingkat pengangguran dan angka kriminalitas, khususnya kejahatan properti. Rahmalia et al., (2016) menemukan bahwa peningkatan tingkat pengangguran berhubungan dengan peningkatan angka kriminalitas, terutama kejahatan properti dan kekerasan. Adapun Fajnzylber et al., (2002) mengembangkan pendekatan teoritis mikro dan menemukan bahwa kondisi ekonomi yang buruk, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ilegal.

Hasil-hasil penelitian ini mendukung konsep bahwa TPT dapat mempengaruhi angka kriminalitas, terutama melalui mekanisme-mekanisme yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dapat berpotensi juga mengurangi angka kriminalitas di suatu wilayah.

## **2.9 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angka kriminalitas**

Secara umum, pendidikan berperan sebagai faktor protektif yang signifikan dalam mengurangi kriminalitas, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan stabil. Teori *Human Capital* menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi dalam modal manusia yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu. Ketika individu memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik, dorongan untuk terlibat dalam aktivitas kriminal menurun, karena mereka memiliki sarana legal untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Lochner dan Moretti (2014) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan, terutama penyelesaian pendidikan menengah, secara signifikan mengurangi tingkat penahanan kriminal di Amerika Serikat. Setiap tambahan tahun pendidikan mengurangi tingkat kriminalitas kekerasan dan kejahatan properti,

menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam mencegah aktivitas kriminal.

Pendidikan memiliki efek memperkecil ketimpangan sosial-ekonomi. Ketika akses terhadap pendidikan meningkat, terutama di kelompok masyarakat yang lebih miskin, kesempatan untuk mobilitas sosial juga meningkat. Teori Mobilitas Sosial menyatakan bahwa pendidikan dapat memperbaiki status sosial-ekonomi individu, mengurangi frustrasi dan ketidakpuasan yang sering dikaitkan dengan perilaku kriminal. Individu yang lebih terdidik cenderung memiliki akses ke pekerjaan legal yang lebih baik dan lebih stabil, yang membantu menekan angka kriminalitas.

Pendidikan tidak hanya menyediakan keterampilan ekonomi, tetapi juga berperan dalam pengembangan moral dan kontrol diri. Sekolah mengajarkan norma-norma sosial dan keterampilan untuk mengelola emosi dan konflik secara lebih konstruktif. Teori Strain menunjukkan bahwa individu yang tidak dapat mencapai tujuan ekonomi atau sosial secara sah sering kali mencari cara alternatif, termasuk kriminalitas. Pendidikan membantu mengatasi kondisi strain ini dengan memberikan alternatif sah untuk pencapaian tujuan.

Pendidikan pada usia muda sangat penting dalam mengurangi risiko kriminalitas di masa dewasa. Menurut Teori Kontrol Sosial, keterikatan dengan institusi sosial seperti sekolah dapat mengurangi keinginan remaja untuk terlibat dalam kejahatan. Remaja yang memiliki prestasi akademik lebih baik dan memiliki ikatan sosial yang kuat melalui pendidikan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Penelitian yang dilakukan oleh Lochner (2014) juga menemukan bahwa peningkatan tingkat kelulusan sekolah menengah berhubungan dengan penurunan angka kriminalitas remaja dan dewasa muda, menunjukkan peran penting pendidikan dalam pencegahan kejahatan sejak dini.

Pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan angka kriminalitas melalui berbagai mekanisme: peningkatan peluang ekonomi, pengurangan ketidaksetaraan sosial, pengembangan kontrol diri, serta pencegahan keterlibatan dalam aktivitas kriminal di masa muda. Studi empiris menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi cenderung mengurangi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kejahatan, baik secara langsung (melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi) maupun tidak langsung (melalui penanaman nilai-nilai sosial yang lebih baik).

## 2.10 Pengaruh PDRB Terhadap Angka kriminalitas

Bruto) menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tinggi rendahnya PDRB sering dijadikan indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Secara umum, terdapat hubungan yang signifikan antara PDRB dan angka kriminalitas.

Teori ekonomi dan studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan PDRB cenderung menurunkan angka kriminalitas. Alasan utama adalah bahwa PDRB yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas dan stabil, dorongan untuk melakukan tindakan kriminal sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menurun. Ketika individu memiliki lebih banyak peluang ekonomi yang sah, mereka cenderung menghindari tindakan kriminal karena biaya melakukan kejahatan (hukuman) menjadi lebih besar daripada manfaatnya.

Sebuah penelitian di Eropa oleh Fajnzylber, Lederman, dan Loayza (2012) menemukan bahwa peningkatan pendapatan per kapita berhubungan dengan penurunan kejahatan kekerasan, seperti pembunuhan dan perampokan. Negara atau wilayah dengan PDRB yang lebih tinggi secara konsisten menunjukkan angka kriminalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah ber-PDRB rendah.

Meskipun peningkatan PDRB cenderung menurunkan angka kriminalitas, ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi dalam suatu wilayah tetap bisa memicu kriminalitas. PDRB yang tinggi belum tentu didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi, karena ketidakadilan ekonomi menciptakan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang kurang sejahtera. Mereka yang merasa tertinggal secara ekonomi lebih rentan untuk terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai cara untuk mengkompensasi ketidaksetaraan tersebut.

Penelitian Kelly (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang kuat dengan angka kriminalitas di berbagai negara. Sementara PDRB tinggi menunjukkan perekonomian yang maju, ketimpangan di antara kelompok masyarakat justru meningkatkan risiko kriminalitas. Jadi,

meskipun PDRB meningkat, jika kesenjangan ekonomi juga membesar, angka kriminalitas bisa tetap tinggi.

PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas melalui beberapa mekanisme. Pada satu sisi, peningkatan PDRB secara umum dapat menurunkan angka kriminalitas karena mencerminkan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas sosial yang lebih baik. Namun, pada sisi lain, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingginya pengangguran dapat mengurangi efek positif dari PDRB terhadap kriminalitas. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berfokus pada pemerataan hasil pembangunan dan penciptaan lapangan kerja juga diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif PDRB terhadap pengurangan angka kriminalitas.

### **2.11 Tipologi**

Tipologi adalah sebuah alat analisis dalam ekonomi regional yang membantu dalam mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah (Sjafrizal, 2018). Tipologi diperkenalkan oleh Lutz (1965) dan umumnya digunakan dalam analisis ekonomi regional untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Namun, dalam perkembangannya, metode ini dapat dimodifikasi untuk mengkaji berbagai hubungan antar variabel sosial-ekonomi lainnya. Beberapa teori yang mendukung bahwa ketimpangan pendapatan (*gini ratio*), tingkat pengangguran terbuka (TPT), pendidikan (APK), dan PDRB dapat diprosikan dengan angka kriminalitas dalam analisis Tipologi antara lain teori kriminalitas Strain yang menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi dapat meningkatkan tekanan sosial yang mendorong individu melakukan kejahatan, selain itu wilayah dengan ketimpangan tinggi dan pengangguran tinggi cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi.

Pada penelitian ini klasifikasi dalam Tipologi bertujuan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan ketimpangan pendapatan, TPT, PDRB, pendidikan, dan angka kriminalitas di Provinsi Lampung dan memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi sosial-ekonomi di Provinsi Lampung. Tujuan utama dari klasifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat disesuaikan dengan kondisi nyata yang terjadi di masing-masing wilayah, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran, efektif,

dan sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan dan kebutuhan klasifikasi maka tipologi ini membagi wilayah ke dalam empat kuadran:

1. Kuadran I: Wilayah dengan indikator ekonomi dan pendidikan yang tinggi tetapi angka kriminalitas juga tinggi wilayah yang makmur tetapi memiliki tantangan sosial tertentu). Kuadran ini menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan, TPT lebih rendah dan pendidikan, PDRB lebih tinggi suatu wilayah (si) dari pada penurunan angka kriminalitas wilayah referensi (s). Selain itu, sektor ini juga memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap angka kriminalitas wilayah tersebut (ski) dibandingkan dengan kontribusinya terhadap angka kriminalitas wilayah referensi (sk). Klasifikasi ini dicirikan oleh pernyataan  $si > s$  dan  $ski > sk$
2. Kuadran II: Wilayah dengan indikator ekonomi dan pendidikan yang tinggi dan angka kriminalitas rendah (wilayah ideal dengan pembangunan yang stabil). Kuadran ini menunjukkan laju peningkatan ketimpangan pendapatan dan TPT (si) lebih rendah sementara pendidikan dan PDRB lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan angka kriminalitas (s). Namun, sektor ini memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap angka kriminalitas (ski) dibandingkan dengan kontribusinya terhadap angka kriminalitas di wilayah referensi (sk). Klasifikasi ini ditunjukkan dengan  $si < s$  dan  $ski > sk$ .
3. Kuadran III: Wilayah dengan indikator ekonomi atau pendidikan rendah tetapi angka kriminalitas tinggi (wilayah yang memerlukan prioritas pembangunan). Kuadran ini menggambarkan bahwa laju peningkatan ketimpangan pendapatan dan TPT (si) lebih tinggi dan pendidikan dan PDRB lebih rendah dibandingkan dengan laju peningkatan ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan dan PDRB di wilayah referensi (s). Namun, sektor ini memiliki kontribusi yang lebih rendah terhadap angka kriminalitas wilayah tersebut (ski) dibandingkan dengan kontribusinya terhadap angka kriminalitas di wilayah referensi (sk). Klasifikasi ini ditandai dengan  $si > s$  dan  $ski < sk$ .
4. Kuadran IV: Wilayah dengan indikator ekonomi atau pendidikan rendah dan angka kriminalitas rendah (wilayah dengan aktivitas ekonomi rendah namun stabil secara sosial). Kuadran ini menggambarkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan dan TPT, pendidikan dan PDRB suatu wilayah (si)

lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan dan PDRB di wilayah referensi ( $s$ ). Selain itu, sektor ini juga memiliki kontribusi yang lebih rendah terhadap angka kriminalitas di wilayah tersebut ( $s_k$ ) dibandingkan dengan kontribusinya angka kriminalitas di wilayah referensi ( $s_k$ ). Klasifikasi ini dicirikan dengan  $s_i < s$  dan  $s_k < s_k$ .

Tipologi adalah sebuah alat yang digunakan untuk memberikan pemahaman tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Alat ini secara dasarnya mengelompokkan daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah (Masbiran, 2019). Klasifikasi ini membantu dalam memahami beragam karakteristik ekonomi regional dan dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi serta formulasi kebijakan yang sesuai untuk masing-masing jenis daerah tersebut (Sjafrizal, 2018).

<p style="text-align: center;"><b>KUADRAN I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketimpangan pendapatan rendah <math>s_i &lt; s</math> angka kriminalitas rendah <math>s_k &lt; s_k</math></li> <li>• TPT rendah <math>s_i &lt; s</math> angka kriminalitas rendah <math>s_k &lt; s_k</math></li> <li>• Pendidikan tinggi <math>s_i &lt; s</math> angka kriminalitas rendah <math>s_k &lt; s_k</math></li> <li>• PDRB rendah <math>s_i &lt; s</math> angka kriminalitas rendah <math>s_k &lt; s_k</math></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>KUADRAN II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketimpangan pendapatan tinggi <math>s_i &gt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> <li>• TPT tinggi <math>s_i &gt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> <li>• Pendidikan tinggi <math>s_i &gt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> <li>• PDRB tinggi <math>s_i &gt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketimpangan pendapatan rendah <math>s_i &lt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> <li>• TPT rendah <math>s_i &lt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> <li>• Pendidikan rendah <math>s_i &lt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> <li>• PDRB rendah <math>s_i &lt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>KUADRAN III</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketimpangan pendapatan tinggi <math>s_i &gt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> <li>• TPT tinggi <math>s_i &gt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> <li>• Pendidikan tinggi <math>s_i &gt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> <li>• PDRB tinggi <math>s_i &gt; s</math> angka kriminalitas tinggi <math>s_k &gt; s_k</math></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>KUADRAN IV</b></p>

Gambar 5. Klasifikasi Menurut Analisis Tipologi

## 2.12 Tinjauan Empiris

Tabel 8. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
1.	Hugues Lagrange (2017)	<i>Crime and Socio-Economic Context</i>	Variabel : <i>Crime and Socio Economic.</i>  Analisis Data : <i>Correlation model and regression</i>	Analisis tren pengangguran, harga dan upah, perkawinan antar laki-laki, dan pendidikan mengarah pada interpretasi kejahatan dalam jangka panjang.
2.	Rafida Khairani, Yeni Ariesa (2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)	Variabel : Tingkat Kriminalitas, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, PDRB dan Pendapatan Perkapita  Analisis Data : Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan regresi linier berganda	Secara parsial masing masing variabel tidak memiliki pengaruh terhadap kriminalitas yang terjadi di Sumatera Utara. Secara simultan secara bersama-sama keempat variabel yaitu pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap terjadinya kriminalitas
3.	Agung Minto Wahyu* , Panji Galih Anugrah, Achmad Muhammad Danyalin, Rakhmaditya Dewi Noorrizki. (2021)	Ketimpangan Ekonomi Berdampak pada Tingkat Kriminalitas? Telaah dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial	Variabel : Energi Terbarukan, CO2, Urbanisasi, dan Pertumbuhan Ekonomi. Analisis Data : narrative review yang merangkum berbagai hasil penelitian dan mengomparasikannya satu sama lain.	Ketimpangan ekonomi yang berdampak pada kriminalitas disebabkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi sumber daya dalam hidupnya.
4.	Ernesto Schargrods, Lucía Freira (2021)	<i>Inequality and Crime in Latin America and the Caribbean: New Data for and Old Question</i>	Variabel : Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Emisi CO2 dan Tingkat Konsumsi Energi Terbarukan.  Analisis Data : Uji PVAR dan Uji Kausalitas Granger.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kejahatan menunjukkan angka yang signifikan dan hubungan positif.
5.	Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman (2018)	<i>Inequality and Violent Crime</i>	Variabel : <i>Inequality and Violent Crime</i>  Analisis Data : Korelasi sederhana dengan analisis regresi dan dari OLS statis ke estimasi GMM dinamis	Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kejahatan dan ketimpangan berkorelasi positif dan tampaknya korelasi ini mencerminkan sebab akibat dari ketimpangan terhadap tingkat kejahatan, bahkan pengendalian terhadap faktor-faktor penentu kejahatan lainnya.

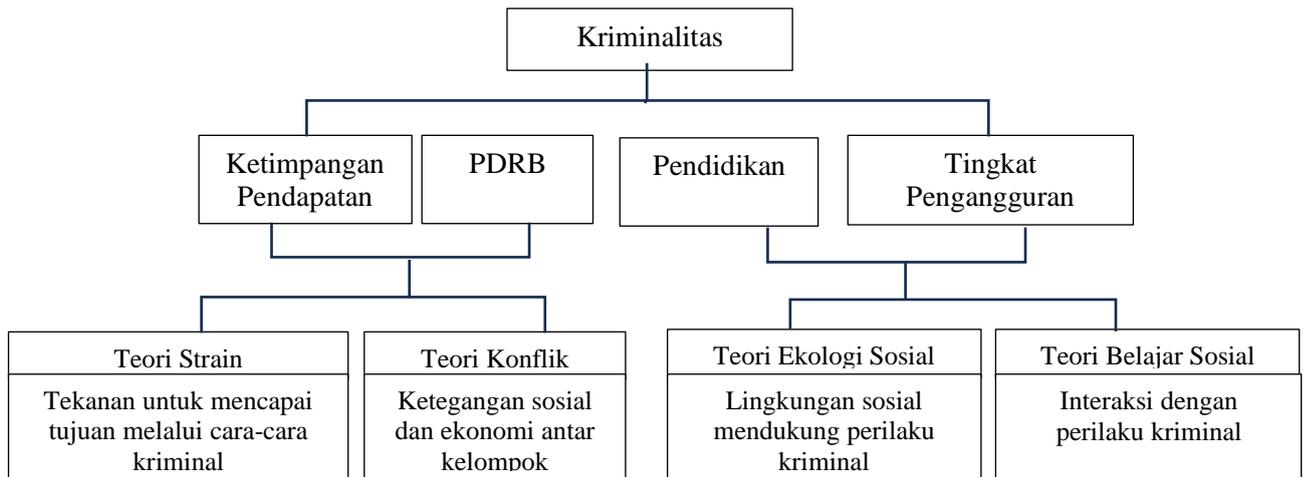
## Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
6.	Adek Oktaviani Edwart, Zul Azhar (2019)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia	Variabel : Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas.  Analisis Data : Analisis Regresi Panel menggunakan Random Effect Model.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas., kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas
7.	Lilik Sugiharti, Miguel Angel Esquivias, Mohd Shahidan Shaari, Lussi Agustini and Hilda Rohmawati (2023)	<i>Criminality and Income Inequality in Indonesia</i>	Variabel : crime rate; well-being; income inequality; quality education; human development; life expectancy.  Analisis Data : generalized method of moments (GMM) approach,.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dikaitkan dengan aktivitas kriminal yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran yang lebih rendah, investasi yang lebih besar, dan pembangunan manusia lebih tinggi (pendidikan dan kesehatan) dapat membantu mengurangi kejahatan di Indonesia.
8.	Prawidya Hariani Rs (2019)	Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara	Variabel : Ketimpangan Ekonomi (Gini Ratio/GR), Tingkat Kriminalitas. Analisis Data : model ekonometrika dengan persamaan Analisis Linier Sederhana	Ketimpangan ekonomi (GR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara
9.	Lim Thye Goha , Shivee Ranjaneer Kaliappanb and Suryati Ishak (2018)	<i>Income Inequality and Crime: Evidence from a Dynamic Panel Data Approach</i>	Variabel : Income Inequality; Crime Rate; Institutional Quality.  Analisis Data : Metode Regresi Dasar dan Uji VAR (Vector Auto Regression).	Hasil empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berhubungan positif dengan kejahatan.
10.	Toto Gunarto dan Marselina (2016)	Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Provinsi Lampung)	Variabel : ketimpangan pendapatan gini ratio, pertumbuhan ekonomi  Analisis Data : Kuadran Tipologi	Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan pemerataan pendapatan yang rendah.

### 2.13 Kerangka Pemikiran

Formulasi *mind map* yang menggambarkan hubungan antara kriminalitas, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran dapat didasarkan pada beberapa teori kriminologi dan teori sosial-ekonomi. Teori-teori utama yang relevan dengan penjelasan ini adalah Teori Strain (*Strain Theory*) yang di pelopori oleh Robert K. Merton. Teori ini menyatakan bahwa tekanan sosial (strain) yang dihasilkan dari ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (seperti kesuksesan finansial) melalui cara yang sah dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Ketimpangan pendapatan menciptakan tekanan sosial karena sebagian masyarakat tidak mampu mencapai standar hidup yang diinginkan meskipun berusaha keras. Tingkat pengangguran yang tinggi juga menyebabkan strain karena individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang mendorong mereka ke arah kriminalitas.

Teori Konflik (*Conflict Theory*) yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Richard Quinney menyatakan bahwa kriminalitas adalah hasil dari ketegangan dan konflik antara kelompok sosial yang berbeda, terutama antara kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial dan ekonomi memperburuk ketegangan ini, yang kemudian dapat menghasilkan tindakan kriminal. Teori Ekologi Sosial (*Social Ecology Theory*) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial dan fisik di mana seseorang tinggal dapat mempengaruhi kemungkinan mereka untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*) oleh Albert Bandura yang menyatakan ketimpangan pendapatan dan pengangguran menciptakan lingkungan di mana perilaku kriminal lebih mungkin dipelajari dan ditiru. Mind Map yang didukung oleh teori-teori di atas adalah:



Sumber Dulkihah, M. (2020).

Gambar. 6 Kerangka Teori

Meningkatnya angka kriminalitas dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan upaya peningkatan ekonomi yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, termasuk populasi di daerah pedesaan maupun perkotaan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk Indonesia. Strategi pembangunan ekonomi ini terfokus pada pertumbuhan sektor ekonomi dengan pengoptimasian sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan, ketidaksetaraan antar wilayah adalah konsekuensi yang wajar, yang merupakan tahap penting dalam evolusi proses pembangunan itu sendiri. Perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemajuan antar wilayah bisa memiliki dampak negatif yang dominan dibandingkan dengan dampak positif pada pertumbuhan tiap wilayah.

Selain menekankan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketidaksetaraan ekonomi, proses pembangunan juga memiliki tujuan yang melibatkan pengurangan tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan, dan pengangguran. Ketidaksetaraan ekonomi muncul karena kurangnya upaya untuk meratakan perkembangan ekonomi. Ketidakmerataan dalam proses pembangunan ini muncul karena terdapat ketidaksetaraan di antara berbagai wilayah, yang tercermin dalam perbedaan antara daerah yang lebih maju dengan daerah lain yang lebih tertinggal atau kurang maju. Ketidaksetaraan ini bisa membawa dampak positif dan negatif.

Dampak positifnya adalah dapat mendorong daerah yang kurang maju untuk bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya demi kesejahteraan yang lebih baik.

Ketimpangan atau ketidaksetaraan, yang diukur melalui Indeks Gini. Kesimpulan yang diterima secara luas dalam bidang ekonomi, statistik, dan ilmu sosial, walaupun ada variasi dalam interpretasi data yang mungkin terjadi. Ketimpangan ekonomi umumnya berkorelasi negatif dengan PDRB per kapita, yang berarti bahwa daerah atau negara dengan Gini Ratio yang tinggi (tingkat ketimpangan yang tinggi) cenderung memiliki ketidaksetaraan pendapatan yang lebih besar antara berbagai kelompok penduduk. Sebaliknya, daerah atau negara dengan Gini Ratio yang rendah (tingkat ketimpangan yang rendah) cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata.

Secara konseptual dan empiris, hubungan antara Gini ratio (tingkat ketidaksetaraan ekonomi) dan tingkat pengangguran dengan angka kriminalitas dapat dijelaskan ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan ketidakpuasan dan frustrasi di masyarakat. Individu yang merasa tidak puas dengan ketidaksetaraan tersebut mungkin cenderung mencari cara alternatif untuk mencapai kepuasan ekonomi, yang dapat mendorong mereka terlibat dalam aktivitas kriminal. Ketika individu mengalami kesenjangan antara tujuan yang diinginkan dan cara untuk mencapainya, mereka dapat merasa tertekan dan cenderung terlibat dalam perilaku yang tidak konvensional atau kriminal. Pengangguran dapat menjadi salah satu bentuk strain yang menciptakan kondisi ini. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial, yang dapat mempengaruhi angka kriminalitas. Individu yang kehilangan pekerjaan mereka mungkin mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan ini bisa melibatkan aktivitas ilegal.

Sepanjang tahun 2019 hingga 2022, Provinsi Lampung mengalami dinamika sosial-ekonomi yang cukup kompleks, terutama dipengaruhi oleh tekanan pandemi Covid-19. Salah satu fenomena yang mencolok adalah fluktuasi angka kriminalitas, yang menunjukkan kecenderungan meningkat pada wilayah-wilayah tertentu. Kriminalitas tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga indikator tekanan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pada periode tersebut, ketimpangan pendapatan antarwilayah dan antarkelompok sosial masih menjadi persoalan struktural yang

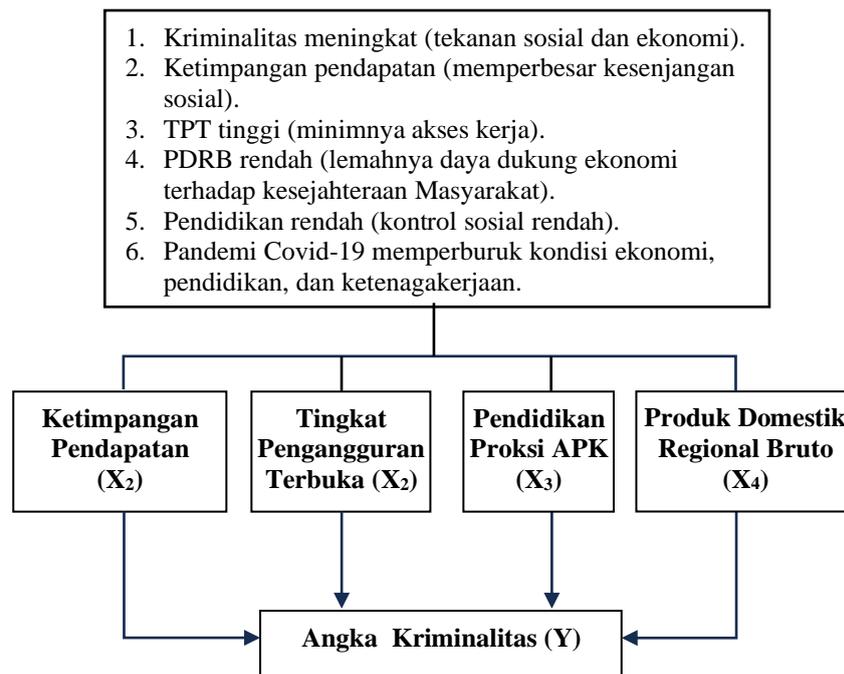
signifikan. Ketimpangan ini tercermin dari nilai Indeks Gini yang bervariasi antar kabupaten/kota. Di beberapa daerah dengan Gini Ratio relatif tinggi, terlihat pola bahwa ketimpangan yang melebar beriringan dengan meningkatnya potensi kriminalitas. Ketimpangan menciptakan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan yang dalam banyak studi dikaitkan dengan meningkatnya risiko kejahatan, terutama kejahatan ekonomi.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan selama masa pandemi, terutama pada tahun 2020 dan 2021, sebagai akibat dari pembatasan kegiatan ekonomi dan melemahnya daya serap pasar tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi menciptakan tekanan psikologis dan sosial, serta dapat memicu peningkatan tindakan kriminal sebagai bentuk survival atau pelampiasan frustrasi ekonomi.

Dalam hal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagian besar daerah di Provinsi Lampung menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pandemi menyebabkan berbagai sektor, terutama perdagangan, jasa, dan pariwisata, mengalami kontraksi. Penurunan kinerja ekonomi daerah ini tidak hanya berdampak pada pendapatan masyarakat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial, termasuk pengendalian kriminalitas.

Fenomena lain yang patut dicermati adalah kondisi pendidikan, di mana angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di beberapa kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup besar. Pandemi memperlebar kesenjangan akses pendidikan, memperburuk kualitas pembelajaran, dan berpotensi menurunkan literasi serta kontrol sosial, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap tingginya angka kriminalitas di kelompok usia muda atau rentan.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana ketimpangan pendapatan, TPT, tingkat pendidikan, dan PDRB secara bersama-sama memengaruhi angka kriminalitas di Provinsi Lampung. Pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antarvariabel ini dapat memberikan arah yang lebih tepat dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti untuk penanggulangan kriminalitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.



Gambar. 7 Kerangka Pemikiran

## 2.14 Hipotesis

Diduga terdapat pengaruh ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan Gini Ratio terhadap angka kriminalitas di suatu wilayah karena gini ratio mencerminkan tingkat ketidaksetaraan pendapatan dalam masyarakat. Di daerah dengan ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi, ada perbedaan besar antara pendapatan kelompok atas dan kelompok bawah. Ketidaksetaraan ekonomi ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan ketidakpuasan di antara kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah, yang mungkin merasa tidak adil. Ini dapat meningkatkan potensi untuk tindakan kriminal, terutama ketika seseorang merasa bahwa peluang ekonomi terbatas dan cara untuk memperoleh penghasilan yang layak sulit diakses. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah

Ha (1): Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kriminalitas di Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung 2019-2022

Selain ketimpangan, TPT diduga berpengaruh terhadap angka kriminalitas karena pengangguran, yang mengacu pada orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dan miskin. Tingkat

pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan banyak masalah sosial lainnya seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan karena pengangguran menjadi akar dari berbagai masalah sosial dengan implikasi yang luas. Selain itu, peningkatan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun menunjukkan perlambatan atau bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Wilayah yang memiliki tingkat pengangguran akan berpengaruh terhadap tingkat kejahatan atau kriminalitas di wilayah tersebut.

Tingkat pengangguran yang tinggi dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Tingkat pengangguran yang sangat tinggi dapat menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar, yang akhirnya mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas atau bahkan terlibat dalam kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap angka kriminalitas, sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan di Provinsi Lampung untuk memeriksa apakah teori ini terbukti. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

Ha(2): TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kriminalitas di Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung 2019-2022

Pendidikan dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kriminalitas. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih baik ke pekerjaan yang sah, peningkatan keterampilan sosial, dan pemahaman tentang norma-norma sosial. Hal ini membuat mereka lebih mungkin untuk menjauhi tindakan kriminal.

Ketika individu tidak dapat mencapai tujuan ekonomi mereka melalui cara-cara yang sah karena kurangnya pendidikan, mereka lebih mungkin melakukan kejahatan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan yang baik memberi individu keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan dan memajukan diri secara sah. Peningkatan pendidikan di kalangan masyarakat cenderung menurunkan angka kriminalitas, terutama kejahatan properti dan kejahatan kekerasan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Ha(3): Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kriminalitas di Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung 2019-2022

PDRB mencerminkan kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan PDRB umumnya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan sosial secara umum. Dalam konteks ekonomi yang lebih stabil, angka kriminalitas cenderung menurun karena masyarakat memiliki akses ke pekerjaan yang sah dan hidup dalam kondisi yang lebih sejahtera.

Namun, apabila PDRB meningkat tetapi disertai dengan ketimpangan pendapatan yang besar, hal ini justru dapat memicu peningkatan kriminalitas. Ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan kelompok yang tertinggal, mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa peningkatan PDRB secara keseluruhan cenderung mengurangi kriminalitas, tetapi wilayah dengan ketimpangan pendapatan yang besar tetap menghadapi tantangan kriminalitas yang tinggi.

Ha(4): PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kriminalitas di Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung 2019-2022

Ketika semua faktor ini (ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan dan PDRB) berinteraksi secara simultan, dampaknya terhadap angka kriminalitas dapat lebih signifikan dibandingkan ketika masing-masing faktor tersebut dipertimbangkan secara terpisah. Ketimpangan pendapatan dapat memperparah dampak negatif pengangguran terhadap kriminalitas. Misalnya, dalam masyarakat dengan ketimpangan pendapatan tinggi, individu yang menganggur mungkin merasa lebih frustrasi dan termarginalkan, meningkatkan kecenderungan mereka untuk melakukan tindak kriminal.

Kombinasi dari tidak adanya pekerjaan dan kesenjangan pendapatan dapat mengakibatkan hilangnya harapan dan rasa putus asa di kalangan masyarakat yang rentan, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka ke arah kriminalitas sebagai jalan keluar terakhir. Ketika ketimpangan pendapatan dan pengangguran tinggi, komunitas-komunitas tertentu mungkin mengalami disorganisasi sosial, di mana norma dan nilai masyarakat melemah, meningkatkan peluang terjadinya kriminalitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha(5): Ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kriminalitas di Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung 2019-2022

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel sosial-ekonomi terhadap angka kriminalitas di Provinsi Lampung pada periode 2019-2022. Jenis penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian ini mengandalkan data numerik yang diperoleh dari data ketimpangan pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat pendidikan (APK), produk domestik regional bruto (PDRB), dan angka kriminalitas.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian korelasional. Penelitian korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen (ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan, PDRB) terhadap variabel dependen (angka kriminalitas). Peneliti bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan, dan PDRB terhadap angka kriminalitas di Provinsi Lampung.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis tipologi sebagai bagian dari desain penelitian. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah-wilayah di Provinsi Lampung berdasarkan dua indikator utama, yaitu tingkat ketimpangan pendapatan dan angka kriminalitas. Dengan menggunakan tipologi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan kriminalitas tertentu, sehingga kebijakan yang tepat dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah (Insukindro, 2017).

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dengan tipe data panel. Gujarati (2012), menjelaskan bahwa data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah data yang mencatat informasi dari satu objek dalam berbagai periode waktu, sedangkan data *cross section* adalah data yang mengumpulkan informasi dari satu atau lebih objek pada satu periode waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan data *time series* selama empat tahun, mulai dari tahun 2019 hingga 2022. Data *cross section* dalam

penelitian ini melibatkan 15 Kabupaten, sehingga total data yang digunakan adalah 60 data. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Provinsi Lampung, jurnal yang relevan dengan isu yang sama juga digunakan dalam penelitian ini.

### **3.3 Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan adalah *time series* dari tahun 2019 sampai 2022. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yang terdiri dari ketimpangan pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, pendidikan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap variabel dependen yaitu angka kriminalitas yang dilakukan di Provinsi Lampung.

Data penelitian diambil dari data tentang ketimpangan pendapatan (Gini ratio), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pendidikan (Angka Partisipasi Kasar), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta angka kriminalitas sepanjang tahun 2019-2022 di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten Kota, namun terdapat satu kabupaten yaitu Kabupaten Pesisir Barat yang tidak lengkap datanya sehingga Kabupaten Pesisir Barat tidak dijadikan sebagai bagian dari data sampel. Berdasarkan penjelasan tersebut maka data penelitian ini terdiri dari 14 kabupaten/kota x 4 maka seluruhnya berjumlah 56 data timeseries. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu analisis berupa *SPSS*.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

Variabel dependent yang diteliti adalah angka kriminalitas. Sementara itu, variabel-variabel independen yang digunakan terdiri dari ketimpangan pendapatan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan menggunakan indeks gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga 2022. Untuk mempermudah pemahaman terhadap variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, berikut adalah definisi variabel yang digunakan:

### 1. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas adalah tingkah laku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materil psikologis dan mengganggu kehidupan bermasyarakat. Angka kriminalitas biasanya diukur dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, yang sering kali diekspresikan sebagai tingkat kejahatan per seribu penduduk dengan menggunakan satuan angka. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{angka kriminalitas} = \frac{\sum \text{kejahatan}}{\sum \text{penduduk}} \times 1000 \quad (\text{BPS, 2020})$$

### 2. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah gambaran pemerataan secara keseluruhan mulai dari pendapatan hingga distribusi baik individu atau rumah tangga di suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh produktivitasnya. Ketimpangan pendapatan diukur dengan gini ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai Nilai *gini ratio* yang rendah (mendekati 0) mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang lebih adil, sedangkan nilai *gini ratio* yang tinggi (mendekati 1) menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata dan berpotensi memicu masalah sosial seperti kriminalitas. Rasio Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi yang satuannya adalah nilai indeks. Rumus umum yang digunakan adalah:

$$\text{GR} = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1}) \quad (\text{Todaro \& Smith, 2011})$$

Keterangan:

GR = Koefisien Gini

$f_{pi}$  = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$FC_i$  = frekuensi kumulatif total pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i

$FC_{i-1}$  = frekuensi kumulatif total pengeluaran pada kelas pengeluaran ke (i-1).

### 3. TPT

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena sudah mendapat pekerjaan tetapi tidak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur persentase angkatan kerja

yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan sehingga satuan yang digunakan adalah persen. Rumus umumnya adalah:

$$TPT = \frac{\Sigma \text{pengangguran terbuka}}{\Sigma \text{angkatan kerja}} \times 100\% \quad (\text{Djohanputro, 2016})$$

#### 4. Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya untuk mendatangkan proses pembelajaran bagi siswa agar dapat memajukan potensi untuk memiliki keterampilan. Pendidikan ini di proxy dari angka partisipasi kasar (APK). APK sering digunakan karena mencerminkan tingkat keterlibatan atau akses individu terhadap pendidikan formal dalam suatu wilayah. APK mengukur jumlah siswa di suatu jenjang pendidikan tertentu (misalnya SD, SMP, SMA) tanpa memperhatikan usia, dibandingkan dengan populasi kelompok usia resmi untuk jenjang tersebut. Penelitian lain yang menggunakan APK sebagai proksi pendidikan adalah penelitian Khairani dan Ariesa (2019) serta penelitian Edwart dan Azhar (2019). APK memungkinkan evaluasi akses pendidikan lebih luas. Satuan yang digunakan adalah persentase. Rumus yang digunakan adalah:

$$APK = \left( \frac{\text{jumlah siswa pada jenjang pendidikan}}{\text{total penduduk usia yang sesuai}} \right) \times 100\% \quad (\text{Djohanputro, 2016})$$

#### 5. PDRB

PDRB adalah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh entitas ekonomi di suatu wilayah pedalaman. Atau merupakan penjumlahan nilai total produk dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Satuan yang digunakan adalah nilai Rupiah. Rumus umum yang digunakan adalah rumus pendekatan produksi sebagai berikut:

$$PDRB = \Sigma (\text{Output} - \text{Input Antara})$$

Keterangan

Output = Total produksi suatu sektor

Input Antara = Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi.  
(Djohanputro, 2016)

### 3.5 Alat Analisis

#### 3.5.1 Uji Asumsi

##### 1. Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat maupun bebas dan juga puak galat (*error term*) mempunyai distribusi normal atau apakah data sudah tersebar secara normal, Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan melihat *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif data sesungguhnya dengan distribusi normal, Jika distribusi data tersebar normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Untuk setiap uji di atas menggunakan rumus hipotesis sebagai berikut:

Ho : data tersebar normal

Ha : data tidak tersebar normal

Kriteria pengujiannya adalah:

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika  $P \text{ value} < \alpha 5\%$
2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika  $P \text{ value} > \alpha 5\%$

##### 2. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi kesamaan varians (homoskedastisitas) yaitu varians *error* bernilai sama untuk setiap kombinasi variabel bebas terhadap variabel terikat, Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka dugaan OLS tidak bersifat BLUE (*best linier unbiased estimator*), karena akan menghasilkan dugaan galat baku yang tidak akurat.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas dengan dasar analisis tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

### 3. Uji Asumsi Multikolinieritas

Uji asumsi multikolinieritas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar peubah bebas. Multikolinieritas adalah keadaan jika satu variabel bebas berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas yang lainnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem multikolinieritas. Untuk mengetahui adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* (Ghozali, 2001). Jika  $VIF > 1$  maka terjadi korelasi antar peubah bebas, Semakin besar nilai VIF menunjukkan bahwa masalah kolinieritas semakin besar. Jika nilai VIF dari satu variabel melebihi 10 maka menunjukkan adanya kasus kolinieritas yang parah, Jika VIF bernilai satu maka menunjukkan tidak ada masalah kolinieritas, karena berarti nilai  $R^2_j=0$ , Kriteria pengujian adalah :

- a.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, jika nilai  $VIF > 1$
- b.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, jika nilai  $VIF < 1$

#### 3.5.2 Regresi Data Panel

Pembentukan data panel yaitu dengan mengkombinasikan data times series dan cross section sehingga terbentuklah suatu kumpulan data. Data panel menggunakan simbol  $r$  untuk periode observasi atau tahunnya sedangkan  $i_t$  adalah simbol dari unit *cross-section* yang akan diobservasi (Widarjono, 2018). Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta X_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

$Y_{it}$  = Variabel terikat untuk unit  $i$  dalam waktu  $t$

$X_{it}$  = Variabel bebas untuk unit  $i$  dalam waktu  $t$

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Slope

$\mu_{it}$  = Residual (*error term*)

Model penelitian ini menggunakan persamaan data panel menguji pengaruh ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan dan PDRB dan angka kriminalitas diimplementasikan pada spesifikasi model sebagai berikut (Widarjono, 2018):

$$Krm_{it} = \beta_0 + \beta_1 GINI_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 PDD_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

$Krm_{it}$	= Angka Kriminalitas (angka)
$GINI_{it}$	= Ketimpangan pendapatan (indeks)
$TPT_{it}$	= Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
$PDD_{it}$	= Pendidikan (%)
$PDRB_{it}$	= Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)
$B_0$	= Konstanta
$\beta_{1,2,3,4}$	= Koefisien
$i$	= Kabupaten/Kota
$\mu$	= Residual (error term)
$t$	= Waktu

Regresi data panel memiliki fungsi yang serupa dengan regresi linier berganda, yaitu untuk memperkirakan nilai intersep dan kemiringan garis (slope). Ketika menggunakan data panel dalam analisis regresi, hasil yang diperoleh dapat menunjukkan nilai intersep dan slope yang bervariasi untuk setiap entitas atau perusahaan serta setiap periode waktu. Estimasi model regresi data panel memerlukan asumsi-asumsi terkait intersep, slope, dan komponen error (gangguan). Menurut Widarjono, (2018), terdapat beberapa bentuk asumsi yang dapat diterapkan terhadap intersep, slope, dan variabel gangguan dalam regresi data panel, antara lain:

1. Intersep dan slope diasumsikan konstan sepanjang waktu dan antar entitas/perusahaan, sementara variasi dijelaskan oleh residual.
2. Intersep diasumsikan berbeda untuk setiap entitas/perusahaan, namun slope tetap.
3. Intersep dianggap berbeda baik antar waktu maupun antar individu, sedangkan slope tetap.
4. Baik intersep maupun slope diasumsikan bervariasi antar individu.
5. Intersep dan slope diasumsikan berbeda antar individu dan juga antar periode waktu.

Berbagai asumsi ini melahirkan beragam pendekatan model dalam regresi data panel. Namun, dalam banyak literatur, hanya tiga asumsi pertama yang umum dijadikan acuan dalam membangun model regresi berbasis data panel. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain (Basuki & Prawoto, 2019):

### 1. *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

### 2. *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

### 3. *Random Effect Model*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS) (Basuki & Prawoto, 2019)

Untuk memilih metode pengujian data panel maka dilakukan uji Chow (likelihood) dan uji Hausman dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Uji Chow (Uji *likelihood*) digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Common/Pool Effect Model*. Jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *Common Effect Model*. Jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*, dan pengujian akan berlanjut ke uji Hausman.
2. Uji Hausman digunakan untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Jika hasil

Uji Hausman tersebut menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model *Random Effect*. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect* (Basuki & Prawoto, 2019).

### 3.5.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, pada tingkat kepercayaan 95%. Uji hipotesis yang dilakukan terdiri dari 2 uji yaitu (Ghozali, 2001);

#### a. Uji t (Uji hipotesis secara parsial)

Uji t merupakan pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi parsial dengan menggunakan uji t apabila besarnya varians populasi tidak diketahui, sehingga pengujian hipotesisnya sangat ditentukan oleh nilai-nilai statistiknya.

Adapun hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0: \beta_1=0$ ,      Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas.

$H_a: \beta_1>0$ ,      Ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas.

$H_0: \beta_2=0$       TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas.

$H_a: \beta_2>0$       TPT berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas.

$H_0: \beta_3=0$ ,      Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas.

$H_a: \beta_3>0$ ,      Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas.

$H_0: \beta_4=0$       PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas.

$H_a: \beta_4>0$       PDRB berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas.

#### b. Uji F (Uji hipotesis secara simultan)

Kriteria pengujian dilakukan secara statistik dengan membandingkan nilai F statistik dengan F tabel. Jika  $F_{stat} \geq F$  tabel pada  $df$   $n-k-1$  maka  $H_0$  ditolak dan jika  $F_{stat} < F$  tabel maka  $H_0$  diterima. Adapun pengujian hipotesis secara probabilistik dilakukan dengan perbandingan nilai probabilitas dengan derajat eror ( $\alpha=0,05$ ). Jika probabilitas ( $sig$ )  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan jika probabilitas ( $sig$ )  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima:

$H_0: \beta_i=0$ , Tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan dan PDRB terhadap angka kriminalitas

$H_a: \beta_i>0$ , Ada pengaruh secara bersama-sama antara ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan dan PDRB terhadap angka kriminalitas

c. R Square

Menurut Ghazali (2011), koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel terikat. Sebaliknya, nilai  $R^2$  yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Setiap penambahan satu variabel independen akan meningkatkan  $R^2$ , tetapi penting untuk melihat apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika dalam uji empiris nilai Adjusted  $R^2$  negatif, maka dianggap bernilai nol. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak digunakan  $R^2$ , melainkan Adjusted  $R^2$  untuk mengevaluasi model regresi.

### 3.5.4 Analisis Tipologi

Pendekatan tipologi digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang pola dan struktur ekonomi di berbagai daerah. Alat tipologi diterapkan melalui pendekatan wilayah. Metode ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat dalam analisis kebijakan terkait ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran terhadap angka kriminalitas di kabupaten atau kota. Daerah yang diteliti akan dikategorikan untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, dan angka kriminalitas (Sjafrizal, 2018).

Penelitian akan melihat bagaimana ketimpangan pendapatan berkorelasi dengan angka kriminalitas di setiap kategori daerah. Daerah dengan pengangguran tinggi dan pertumbuhan ekonomi lambat mungkin memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi (Sjafrizal, 2018).

Berkaitan dengan kebijakan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan, PDRB dan angka kriminalitas dapat diformulasikan untuk

mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan pengangguran guna mengurangi angka kriminalitas. Misalnya, kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja mungkin lebih efektif, kebijakan redistribusi pendapatan mungkin diperlukan untuk mengurangi ketimpangan dan kriminalitas.

Dengan menggunakan tipologi, peneliti dapat mengkategorikan daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, lalu menganalisis bagaimana ketimpangan pendapatan dan pengangguran mempengaruhi angka kriminalitas. Pendekatan ini membantu dalam memahami dinamika regional yang kompleks dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kriminalitas melalui pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesempatan kerja (Sjafrizal, 2018).

Untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan dua indikator utama, yakni gini ratio per daerah. Klasifikasi ini dilakukan dengan memplot rata-rata gini ratio sumbu vertikal dan angka kriminalitas pada sumbu horizontal. Tipologi dimaksudkan untuk mempermudah analisis spasial dan mengidentifikasi karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Alat analisis ini, kita dapat menggambarkan empat karakteristik pertumbuhan yang berbeda untuk setiap daerah, yaitu daerah yang memiliki pertumbuhan cepat dan pendapatan tinggi, daerah maju yang mengalami tekanan, daerah dengan pertumbuhan sedang, dan daerah yang relatif tertinggal. Ini dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks menggunakan Tipologi sebagai berikut:

Tabel 9 Tipologi Kriminalitas, Gini Ratio, TPT, Pendidikan, dan PDRB

<b>GR, TPT, Pdd PDRB</b>	<b>Kriminalitas</b>	
	( $y_i > \bar{y}$ )	( $y_i < \bar{y}$ )
( $r_i > \bar{r}$ )	<b>Kuadran I</b> Daerah yang makmur tetapi memiliki tantangan sosial tertentu	<b>Kuadran II</b> Daerah ideal dengan pembangunan yang stabil
( $r_i < \bar{r}$ )	<b>Kuadran III</b> Daerah yang memerlukan prioritas pembangunan	<b>Kuadran IV</b> Daerah dengan aktivitas ekonomi rendah namun stabil secara sosial

Keterangan:

$r_i$  = Ketimpangan pendapatan (indeks), TPT (%), pendidikan (%) dan PDRB kabupaten/kota (perkapita);

- r = Rata-rata Ketimpangan pendapatan, TPT, pendidikan dan PDRB kabupaten/kota;
- y1 = Angka kriminalitas kabupaten/kota;
- y = Rata-rata angka kriminalitas kabupaten/kota

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Persamaan regresi menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks *Gini Ratio*, Tingkat Pengangguran Terbuka, pendidikan yang diproksi dari Angka Partisipasi Kasar dan PDRB berpengaruh terhadap angka kriminalitas. Kecenderung meningkatnya angka kriminalitas di Provinsi Lampung disebabkan oleh ketimpangan pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, pendidikan dan PRDB.
2. Uji F menghasilkan nilai F sebesar 35,603 dengan signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan PDRB secara bersama sama memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas. variabel-variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan 73,6% variasi angka kriminalitas, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.
3. Tipologi berdasarkan ketimpangan ekonomi (GR) dengan angka kriminalitas menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Tengah masih memiliki masalah sosial-ekonomi yang kompleks dan memerlukan langkah strategis kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keamanan. Kota Metro memiliki mekanisme sosial atau kebijakan yang dapat menstabilkan situasi meskipun terdapat ketimpangan. Kabupaten Lampung Utara menunjukkan faktor lain selain ketimpangan pendapatan yang mempengaruhi angka kriminalitas. Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang stabil dan relatif Sejahtera dan aman.
4. Tipologi yang memplot TPT dan Angka Kriminalitas menunjukkan daerah dengan TPT tinggi dan kriminalitas tinggi (Lampung Selatan, Lampung Utara, Kota Bandar Lampung) menunjukkan masalah sosial-ekonomi serius yang memerlukan intervensi untuk mengurangi pengangguran dan kejahatan. Daerah dengan TPT tinggi tapi kriminalitas rendah (Pesawaran,

Pringsewu, Kota Metro) mencerminkan stabilitas sosial meskipun ada tantangan ekonomi.

5. Tipologi plotting PDRB dan Angka Kriminalitas menunjukkan daerah dengan PDRB tinggi dan kriminalitas tinggi (Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung) memiliki kesejahteraan ekonomi yang baik tetapi menghadapi masalah sosial yang memicu kriminalitas. Wilayah dengan PDRB rendah dan kriminalitas rendah (Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Metro) menunjukkan stabilitas ekonomi dan sosial yang lebih baik.
6. Tipologi Pendidikan dan Angka Kriminalitas menunjukkan Wilayah dengan pendidikan tinggi dan kriminalitas tinggi (Lampung Timur, Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung) menunjukkan bahwa akses pendidikan yang baik belum mampu sepenuhnya menekan kejahatan karena adanya faktor sosial lain. Daerah dengan pendidikan rendah dan kriminalitas rendah (Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan) memiliki stabilitas sosial yang kuat meskipun akses pendidikan masih terbatas.

## 5.2 Saran

1. **Pengurangan Angka Kriminalitas melalui Penurunan Ketimpangan Pendapatan**  
Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah harus meningkatkan efektivitas program-program bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran di wilayah dengan ketimpangan pendapatan tinggi, seperti Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Melakukan pemberdayaan ekonomi dengan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberian akses kredit mikro dan pelatihan kewirausahaan.
2. **Penurunan Angka Kriminalitas dengan Penurunan TPT**
  - a. Penciptaan Lapangan Kerja Baru dengan menggandeng sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan pariwisata, terutama di wilayah dengan TPT tinggi seperti Kabupaten Lampung Utara dan Kota Bandar Lampung.

- b. Program Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan dengan mengadakan program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini. Fokuskan pelatihan pada daerah dengan pengangguran tinggi dan kriminalitas, agar masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan kesempatan mendapatkan pekerjaan.

#### **4. Penurunan Angka Kriminalitas melalui Peningkatan Pendidikan**

- a. Pemerintah daerah harus meningkatkan akses pendidikan berkualitas, terutama di wilayah dengan APK rendah seperti Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji
- b. Melakukan integrasi pendidikan dan ketenagakerjaan.

#### **4. Penurunan Angka Kriminalitas melalui Peningkatan PDRB**

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan investasi di sektor unggulan seperti industri, pariwisata, dan UMKM dengan insentif serta penyederhanaan perizinan serta memperbaiki infrastruktur ekonomi seperti jalan, transportasi, dan kawasan ekonomi terpadu untuk mendukung aksesibilitas dan perdagangan.
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui integrasikan pelatihan vokasi dan kewirausahaan dalam pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, dan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.

#### **6. Kolaborasi Antara Pemerintah Daerah dan Provinsi**

- a. Sinkronisasi Kebijakan Antardaerah dengan memfasilitasi kolaborasi antarkabupaten/kota dalam penanganan masalah ekonomi dan sosial yang berhubungan dengan kriminalitas.
- b. Pembentukan tim khusus untuk menangani kriminalitas dan ketimpangan ekonomi, komposisinya terdiri dari tim lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk bekerja sama menangani masalah kriminalitas dan ketimpangan ekonomi secara terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aebi, M. F., & Linde, A. (2012). Crime Trends in Western Europe according to Official Statistics from 1990 to 2007. *The International Crime Drop*, 37–75. [https://doi.org/10.1057/9781137291462\\_3](https://doi.org/10.1057/9781137291462_3)
- Anata, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB perkapita Jumlah Penduduk dan Index Williamson Terhadap Tingkat Kriminalitas (Studi Pada 31 Provinsi Di Indonesia Tahun 2007-2012). *Universitas Brawijaya*.
- Astari, M., Hamzah, L. M., & Ratih, A. (2019). Hukum OKUN: Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 37–44. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i1.32>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews). In *PT Rajagrafindo Persada, Depok* (Vol. 18). PT Rajagrafindo Persada.
- BPS. (2020). *Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2020*.
- BPS. (2023). Provinsi Lampung Dalam Angka Dalam Angka 2023. In *Provinsi Lampung*.
- BPS. (2024). Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS-Statistics of Lampung Province). *Badan Pusat Statistik*.
- Cerdá, M., Tracy, M., & Keyes, K. M. (2018). Reducing Urban Violence: A Contrast of Public Health and Criminal Justice Approaches. *Epidemiology*, 29(1), 142–150. <https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000756>
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Djohanputro, B. (2016). *Prinsip-prinsip ekonomi Makro*. Penerbit PPM.
- Edwart, A. O., & Azhar, Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 759. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7703>
- Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002). Inequality and violent crime. *Journal of Law and Economics*, 45(1 I), 1–40. <https://doi.org/10.1086/338347>
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP Undip.

- Goh, L. T., Kaliappan, S. R., & Ishak, S. (2018). Income inequality and crime: Evidence from a dynamic panel data approach. *International Journal of Economics and Management*, 12(Special Issue 2), 479–490.
- Gould, E. D., Weinberg, B. A., & Mustard, D. B. (2002). Crime rates and local labor market opportunities in the United States: 1979-1997. *Review of Economics and Statistics*, 84(1), 45–61. <https://doi.org/10.1162/003465302317331919>
- Gunarto, T., & Marselina. (2016). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(3). [ep.feb.unila.ac.id](http://ep.feb.unila.ac.id)
- Hardijanto, D., & Qomar, N. (2018). *Penerapan Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber*. Penedacta.
- Hariani, P. (2019). Analisis ketimpangan ekonomi dan pengaruhnya terhadap tingkat kriminalitas sumatera utara. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 56–76.
- Hariani, P., & Syahputri, A. R. (2016). Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(1), 56–76.
- Insukindro. (2017). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Bank Indonesia dan Program Studi MEP.
- Mankiw, G. (2003). *Makro Ekonomi* (F. Liza & I. Nurmawan (eds.)). Penerbit Erlangga.
- Masbiran, V. U. K. (2019). Analisis Tipologi Berdasarkan Indikator Fundamental Ekonomi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 195–211.
- Mutia, A. (2021). *10 Negara dengan Tingkat Kriminalitas tertinggi di Dunia 2021*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/18532748a776457/>.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Graha Ilmu.
- Naibaho, G. O., Mandei, J. R., & Pangemanan, L. R. J. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 16(3), 369. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.3.2020.31093>
- Nursa Fitri, Junaidin Zakaria, & Hasbi. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019. *Tata Kelola*, 8(1), 1–35. <https://doi.org/10.52103/tatakelola.v8i1.453>
- Pyle, D. J. (2019). The Economics of Crime. *Economic Affairs*, 9(2), 6–9. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.1989.tb01100.x>
- Rahayu, E. S. (2010). Analisis Tipologi pada Strategi Pengembangan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Boyolali. *Journal of Rural and Development*, 1(2), 105–121. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/download/23678/17098>

- Rahmalia, S., Arisuni, & Triani, M. (2016). Pengaruh tingkat Pendidikan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2010). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media Group.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Agustin, L., & Rohmawati, H. (2022). Criminality and Income Inequality in Indonesia. *Social Sciences*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/socsci11030142>
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Perkasa.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- Wahyu, A. M., Anugrah, P. G., Danyalin, A. M., & Noorizki, R. D. (2021). Ketimpangan Ekonomi Berdampak pada Tingkat Kriminalitas? Telaah dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 170. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.35361>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Wignjosoebroto, S. (2003). *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum UII.